



# LMCK

(LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA)



*TRIWULAN I | 2025*

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II MALUKU UTARA  
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI





**Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I**  
Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara Tahun 2025

**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN**  
**PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I**  
**TAHUN 2025**

| No. | Proses    | Nama                        | Jabatan                                                                  | Tanggal  | Paraf |
|-----|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 1.  | Dikonsep  | Halima Laitupa, A.Md.       | Analisis Kepegawaian Pelaksana                                           | 9/10/25  |       |
| 2.  | Diperiksa | Hamka Husen, SE.,MM         | Kepala Subbagian Tata Usaha                                              | 14/10/25 |       |
| 3.  | Disetujui | Hamka Husen, SE.,MM         | Kepala Subbagian Tata Usaha                                              | 13/04/25 |       |
| 4.  | Disetujui | Yofie Aditama, S.H., M.M.   | Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan SDP                               | 13/04/25 |       |
| 5.  | Disetujui | Santo Igno Gelu, S.Si.T.    | Kepala Seksi Prasarana Jalan SDP                                         | 14/04/25 |       |
| 6.  | Disetujui | Nanang Rahardjo, S.H., M.H. | Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan Sungai Danau Penyeberangan dan Pengawasan | 14/04/25 |       |

# KATA PENGANTAR

---



Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara mengemban amanah menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat.

Sebagai institusi publik, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

Penyusunan Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun isi dari laporan ini mencakup Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2025 serta tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja Tahun 2025.

Kami berharap Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Ternate, 15 April 2025

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat

Kelas II Maluku Utara



Joko Kusnanto, ST, M.Sc

NIP. 197811152006041001

# IKHTISAR EKSEKUTIF

---

Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melanjutkan kepemimpinannya melalui Kabinet Indonesia Maju periode Tahun 2025 – 2029 mengusung Visi “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut diterjemahkan lebih lanjut ke dalam 8 (delapan) Agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJMN periode 2025 – 2029. Pencapaian visi Kabinet Kerja tersebut dapat terwujud apabila segenap jajaran pemerintahan menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal, yang direfleksikan dari pencapaian kinerja dalam mendukung agenda prioritas nasional.

Dalam mendukung visi Presiden RI, Kementerian Perhubungan mengemban tugas strategis sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara yaitu Kementerian Perhubungan sebagai unsur pelaksana pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perhubungan. Dalam menjalankan tugas di bidang perhubungan, Kementerian Perhubungan secara umum melaksanakan agenda pembangunan nasional Prioritas Nasional 5 (PN-5), yaitu Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian Perhubungan melaksanakan dukungan terhadap PP 1 – Infrastruktur Pelayanan Dasar, PP 2 – Infrastruktur Ekonomi, dan PP 3 – Infrastruktur Perkotaan, melalui pelaksanaan Kegiatan Prioritas (KP) sebagai berikut: 1. KP – Keselamatan dan Keamanan Transportasi (PP 1); 2. KP – Konektivitas Kereta Api (PP 2); 3. KP – Konektivitas Laut (PP 2); 4. KP – Konektivitas Udara (PP 2); 5. KP – Konektivitas Darat dan Antarmoda (PP 2); dan 6. KP – Transportasi Perkotaan (PP 3).

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara Tahun 2025-2029, telah menetapkan Visi yang merupakan pengejawantahan dari visi Kementerian Perhubungan 2025 – 2029 dalam rangka mendukung terwujudnya visi Presiden Republik Indonesia 2025 - 2029, yaitu: Perhubungan Darat yang andal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan Visi dan Misi

---

Presiden dan Wakil Presiden: “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”.

Renstra memuat 5 (lima) tujuan Pembangunan sub sektor Perhubungan Darat, yakni:

1. Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi;
2. Meningkatnya pelayanan transportasi darat;
3. Meningkatnya keselamatan transportasi darat;
4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat;
5. Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel.

Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan I Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara Tahun 2025 merupakan tolak ukur instansi pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2025 yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab. Laporan ini mencakup pelaksanaan sasaran kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara Tahun 2025-2029 dengan total jumlah Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebanyak 10 Indikator. Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Triwulan I Tahun 2025 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara telah melaksanakan dengan baik 5 (lima) Indikator Kinerja yang lebih besar atau sama dengan 100% ( $\geq 100\%$ ), dan 5 (lima) Indikator Kinerja yang kurang dari 100% ( $0\% \leq IK < 100\%$ ). Hasil rata-rata pengukuran pencapaian sasaran yaitu sebesar 74,68 %, dapat disimpulkan bahwa kebijakan, program, sasaran, indikator kinerja utama dan kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana dengan cukup baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara Tahun 2025-2029 kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

Misi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan publik. Hal ini dicerminkan dengan upaya perbaikan atas setiap sistem manajemen yang dimiliki, antara lain melalui penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), pelaksanaan program reformasi birokrasi, pelaksanaan monitoring yang dilakukan secara berkala, serta adaptasi terhadap teori/praktik terbaik dan terkini.

## ►►► Daftar Isi

### HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN MONITORING CAPAIAN KINERJA

### KATA PENGANTAR

### RINGKASAN EKSEKUTIF

### DAFTAR ISI

### DAFTAR TABEL

### DAFTAR GAMBAR

### DAFTAR LAMPIRAN

## Bab I PENDAHULUAN

|     |                                                      |    |
|-----|------------------------------------------------------|----|
| I.1 | Latar Belakang.....                                  | I- |
| I.2 | Tugas Pokok dan Fungsi.....                          | I- |
|     | I.2.1 Bagan Struktur Organisasi .....                | I- |
| I.3 | Sumber Daya Manusia.....                             | I- |
| I.4 | Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan .....        | I- |
| I.5 | Sistematika Laporan .....                            | I- |
| I.6 | Uraian Singkat Perencanaan Strategis .....           | I- |
|     | I.6.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025..... | I- |
| I.7 | Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....           | I- |

## Bab II AKUNTABILITAS KINERJA

|         |                                                                                         |     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2.1     | Tahapan Pengukuran Kinerja .....                                                        | II- |
| 2.2     | Pengukuran Capaian Kinerja .....                                                        | II- |
| A.      | SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi |     |
| IKK 1.1 | Persentase Keberintisan Angkutan Jalan Nasional                                         |     |
| a.1     | Definisi Indikator Kinerja Kegiatan .....                                               | II- |
| a.2     | Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....  | II- |
| a.3     | Analisis Keberhasilan/Kegagalan .....                                                   | II- |
| a.4     | Upaya Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang....                                 | II- |
| IKK1.5  | Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keberintisan Angkutan Penyeberangan                    |     |
| a.1     | Definisi Indikator Kinerja Kegiatan .....                                               | II- |
| a.2     | Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....  | II- |
| a.3     | Analisis Keberhasilan/Kegagalan .....                                                   | II- |
| a.4     | Upaya Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang....                                 | II- |
| IKK1.6  | Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi                                                    |     |
| a.1     | Definisi Indikator Kinerja Kegiatan .....                                               | II- |
| a.2     | Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....  | II- |
| a.3     | Analisis Keberhasilan/Kegagalan .....                                                   | II- |
| a.4     | Upaya Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang....                                 | II- |

|                                                                                            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| B. SK2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat .....                                     | II-  |
| IKK2.3 Persentase Pelaksanaan SPM di Pelabuhan SDP                                         |      |
| a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan .....                                              | II-  |
| a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ..... | II-  |
| a.3 Analisis Keberhasilan/Kegagalan .....                                                  | II-  |
| a.4 Upaya Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang....                                | II-  |
| C. SK3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat                                         |      |
| IKK3.1 Persentase Perlengkapan Jalan yang Terpasang terhadap Kondisi Ideal                 |      |
| a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan .....                                              | II-  |
| a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ..... | II-  |
| a.3 Analisis Keberhasilan/Kegagalan .....                                                  | II-  |
| a.4 Upaya Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang....                                | II-  |
| IKK3.5 Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan        |      |
| a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan .....                                              | II-  |
| a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ..... | II-  |
| a.3 Analisis Keberhasilan/Kegagalan .....                                                  | II-  |
| a.4 Upaya Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang....                                | II-  |
| IKK7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                         | II-  |
| a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan .....                                              | III- |
| a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ..... | II-  |
| a.3 Analisis Keberhasilan/Kegagalan .....                                                  | II-  |
| a.4 Upaya Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang....                                | II-  |
| IKK7b Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP                         |      |
| a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan .....                                              | II-  |
| a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ..... | II-  |
| a.3 Analisis Keberhasilan/Kegagalan .....                                                  | II-  |
| a.4 Upaya Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang....                                | II-  |
| D. SK4 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat            |      |
| IKK4.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat ..                      |      |
| a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan .....                                              | II-  |
| a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ..... | II-  |
| a.3 Analisis Keberhasilan/Kegagalan .....                                                  | II-  |
| a.4 Upaya Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang....                                | II-  |
| E. SK5 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel .....                     |      |
| IKK5.1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat                        |      |
| a.1 Definisi Indikator Kinerja Kegiatan .....                                              | II-  |
| a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ..... | II-  |



|        |                                                                          |     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| a.3    | Analisis Keberhasilan/Kegagalan .....                                    | II- |
| a.4    | Upaya Meningkatkan Capaian di masa yang akan datang....                  | II- |
| 2.3    | Realisasi Anggaran .....                                                 | II- |
| 2.3.1. | Alokasi Pagu Anggaran Tahun 2025 .....                                   | II- |
| a.1    | Rincian Per Sumber Dana Tahun 2025 .....                                 | II- |
| a.2    | Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2025 .....                               | II- |
| a.3    | Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran .....                            | II- |
| 2.3.2  | Refocusing Anggaran Tahun 2025 .....                                     | II- |
| a.1    | Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2025 .....                          | II- |
| a.2    | Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2025 .....                        | II- |
| a.3    | Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis<br>Belanja Ta.2025 ..... | II- |
| a.4    | Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Ta 2025..             | II- |
| 3.3.3  | Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2025 – 2029 .....                  | II- |
| 2.4    | Realisasi Anggaran Tahun 2025 .....                                      | II- |
| 3.4.1  | Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Ta 2025...           | II- |
| 3.4.2  | Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025 .....                    | II- |
| 3.4.3  | Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025 .....                      | II- |
| 3.4.4  | Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja .....                  | II- |
| 2.5    | Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....                     | II- |
| 2.6    | Hambatan dan Kendala .....                                               | II- |

### **Bab III PENUTUP**

|       |                                                                   |      |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------|
| 3.1   | Penutup .....                                                     | III- |
| 3.1.2 | Ringkasan Capaian .....                                           | III- |
| 3.2   | Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab ..... | III- |

### **Lampiran**

1. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
3. Rencana Aksi Tahun 2025
4. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2025
5. Lain lain yang dianggap perlu





# PENDAHULUAN

AKUNTABILITAS  
KINERJA

PENUTUP

LAMPIRAN

## BAB I

BAB II

BAB III



# BAB I

## PENDAHULUAN

### I. 1. LATAR BELAKANG

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara dituntut untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan dengan *Prudent*, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien sesuai dengan prinsip - prinsip *Good Governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga itu diperlukan Akuntabilitas Publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraanya.

---



## **I. 2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas PM 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Transportasi Darat. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara mempunyai 4 (empat) unit kerja Eselon IV, sebagai berikut :

1. Subbagian Tata Usaha;
2. Seksi Prasarana Jalan SDP
3. Seksi Sarana dan Angkutan jalan, SDP
4. Seksi Lalu Lintas Jalan, Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran;
2. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan, dan pengawasan terminal penumpang Tipe A, Terminal Barang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), pelaksanaan kalibrasi peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, pelaksanaan pemeriksaan fisik rancang bangun sarana angkutan jalan serta pengawasan teknis sarana lalu lintas dan angkutan jalan di jalan nasional dan pengujian berkala kendaraan bermotor dan industri karoseri;
3. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengawasan angkutan orang antar kota antar provinsi, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan barang, penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pengawasan tarif angkutan jalan;
4. Pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, peningkatan, penyelenggaraan dan pengawasan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan yang

diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan angkutan sungai danau dan penyeberangan yang komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, penjamin keamanan dan ketertiban penyidikan dan pengusulan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan, sungai danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, peningkatan kinerja dan keselamatan lalu lintas dan angkutan, pelayanan jasa kepelabuhan serta pengusulan dan pemantauan tarif dan penjadwalan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial;

5. Pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, dan hubungan masyarakat; dan
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Dengan dasar hukum Peraturan Menteri Perhubungan No PM 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat. Tipologi (BPTD) terdiri atas:

a. BPTD Kelas I;

Susunan Organisasi BPTD Kelas I terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Bidang Prasarana;
- c. Bidang Sarana dan Angkutan;
- d. Bidang Lalu Lintas dan Pengawasan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

b. BPTD Kelas II;

Susunan Organisasi BPTD Kelas II terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Prasarana Transportasi Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- c. Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- d. Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. BPTD Kelas III.

Susunan Organisasi BPTD Kelas III terdiri atas:

- a. Satuan Pelayanan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

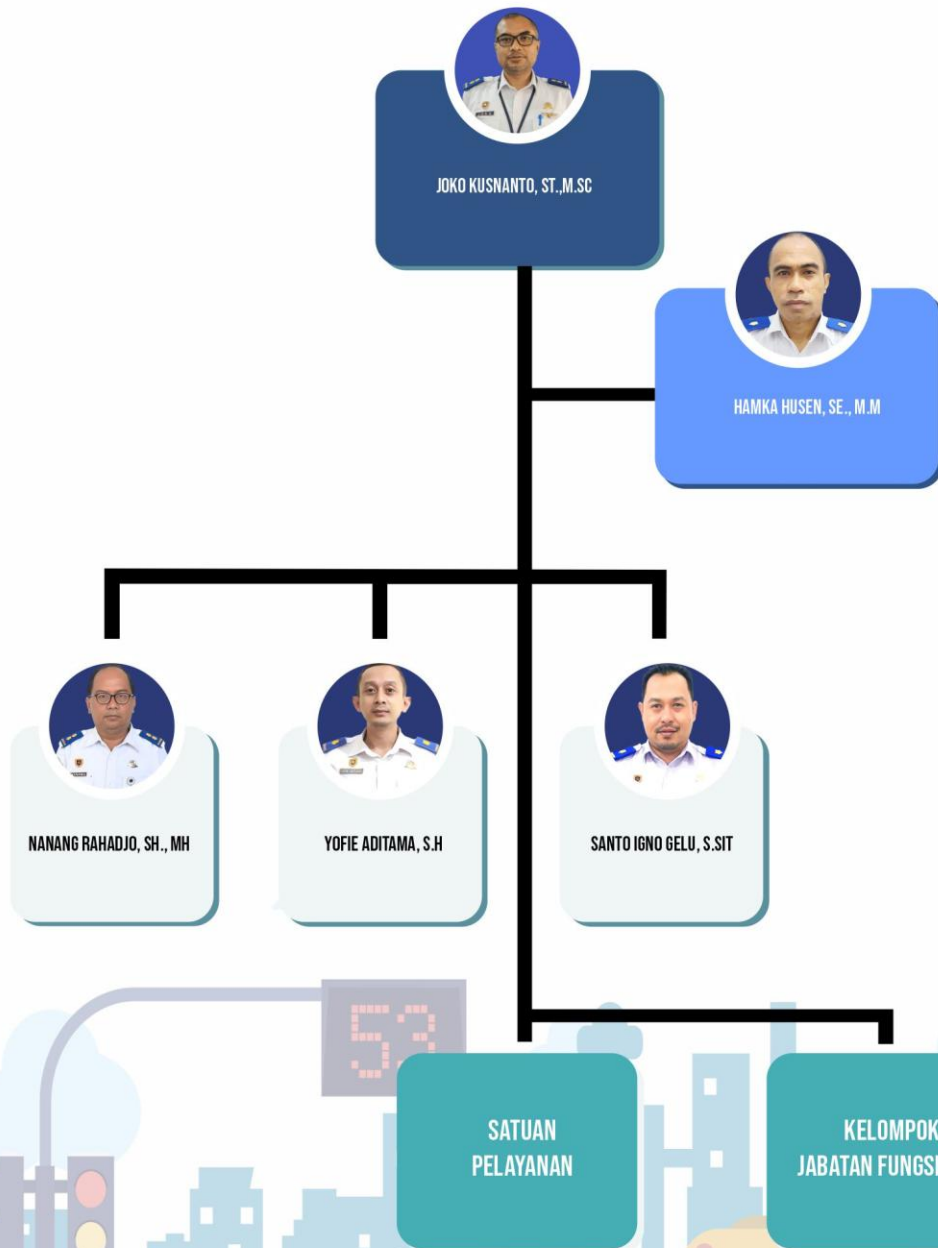
Terdapat Tiga Puluh Tiga (33) Balai Pengelola Transportasi Darat sebagai berikut.

- |                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| 1. BPTD Kelas II Aceh;                 | 14. BPTD Kelas III D.I.Y     |
| 2. BPTD Kelas II Sumut;                | 15. BPTD Kelas II Jatim;     |
| 3. BPTD Kelas II Sumbar;               | 16. BPTD Kelas II Bali;      |
| 4. BPTD Kelas II Riau;                 | 17. BPTD Kelas II NTB;       |
| 5. BPTD Kelas II Kepulauan<br>Riau;    | 18. BPTD Kelas II NTT;       |
| 6. BPTD Kelas II Jambi;                | 19. BPTD Kelas II Kalbar;    |
| 7. BPTD Kelas III Bengkulu;            | 20. BPTD Kelas II Kalsel;    |
| 8. BPTD Kelas II Lampung;              | 21. BPTD Kelas II Kalteng;   |
| 9. BPTD Kelas II Sumatera<br>Selatan;  | 22. BPTD Kelas II Kaltim;    |
| 10. BPTD Kelas III Bangka<br>Belitung; | 23. BPTD Kelas III Kaltara;  |
| 11. BPTD Kelas II Banten;              | 24. BPTD Kelas II Sultra;    |
| 12. BPTD Kelas II Jabar;               | 25. BPTD Kelas II Sulsel;    |
| 13. BPTD Kelas II Jateng;              | 26. BPTD Kelas III Sulbar;   |
|                                        | 27. BPTD Kelas II Sulteng;   |
|                                        | 28. BPTD Kelas II Gorontalo; |
|                                        | 29. BPTD Kelas II Sulut      |
| 30. BPTD Kelas II Maluku;              |                              |
| 31. BPTD Kelas II Maluku Utara;        |                              |
| 32. BPTD Kelas II Papua;               |                              |
| 33. BPTD Kelas II Papua Barat.         |                              |





# BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II MALUKU UTARA**



### I. 3. Sumber Daya Manusia

Kebutuhan Pegawai Unit Kerja Mandiri Di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara sesuai dengan pembentukan Balai Pengelola Transportasi Darat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas PM 6 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Transportasi Darat perlu didukung oleh penambahan jumlah pegawai dalam rangka pelaksanaan tupoksi BPTD. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara menaungi sebanyak 180 Pegawai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I. Pemetaan SDM BPTD Kelas II Maluku Utara

| No | Unit Kerja                                                           | Jumlah Pegawai |         | Total |
|----|----------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|
|    |                                                                      | ASN            | Non ASN |       |
| 1  | Kepala BPTD                                                          | 1              |         | 1     |
| 2  | Subbagian Tata Usaha                                                 | 15             | 20      | 35    |
| 3  | Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan     | 8              | 1       | 9     |
| 4  | Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan | 11             | 1       | 12    |
| 5  | Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan               | 7              | 5       | 12    |
| 7  | Satpel PP Daruba – Morotai                                           | 8              | 5       | 13    |
| 8  | Satpel PP Weda                                                       | 6              | 3       | 9     |
| 9  | Wilker PP Patani                                                     | 1              | 1       | 2     |
| 10 | Wilker PP Gebe                                                       | 1              | 2       | 3     |
| 11 | Satpel PP Tobelo                                                     | 3              | 2       | 5     |
| 12 | Wilker PP Subaim                                                     | 1              | 0       | 1     |
| 13 | Satpel PP Bastiong                                                   | 14             | 7       | 21    |
| 14 | Wilker PP Rum                                                        | 5              | 3       | 8     |
| 15 | Wilker PP Moti                                                       | 1              | 1       | 2     |
| 16 | Wilker PP Batang Dua                                                 | 0              | 0       | 0     |
| 17 | Satpel PP Sofifi                                                     | 10             | 3       | 13    |
| 18 | Wilker PP Sidangole                                                  | 3              | 3       | 6     |
| 19 | Wilker PP Dowora                                                     | 1              | 1       | 2     |
| 20 | Satpel PP Babang                                                     | 2              | 2       | 4     |
| 21 | Wilker PP Obi                                                        | 1              | 1       | 2     |
| 22 | Wilker PP Saketa                                                     | 1              | 1       | 2     |

|    |                         |     |    |     |
|----|-------------------------|-----|----|-----|
| 23 | Wilker PP Kayoa         | 1   | 1  | 2   |
| 24 | Wilker PP Makian        |     | 1  | 1   |
| 25 | Satpel PP Sanana        | 1   | 1  | 3   |
| 26 | Wilker PP Mangole       | 1   | 1  | 2   |
| 27 | Wilker PP Bobong        | 1   | 1  | 2   |
| 28 | Kapal Patroli KN.P 3.24 | 4   | 5  | 9   |
|    | Jumlah Keseluruhan      | 109 | 71 | 180 |

## I. 4. POTENSI, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN

### I.4.1. Kewenangan

#### a. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

- 1) Terkait prasarana merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;
- 2) Terkait jalan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (sekarang bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);
- 3) *Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009*

Berbagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian masih terdapat Petunjuk Teknis yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang.

#### b. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- 1) Pembagian urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, untuk Pemerintah Pusat yaitu Penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen);
- 2) Komitmen Pemda dalam mendukung Pembangunan Prasarana Sub Sektor Perhubungan Darat, seperti ketersediaan/pembebasan lahan untuk jalan akses.

#### c. PM No. 122 Tahun 2018

Yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan dalam Transportasi Penyeberangan adalah sebagai berikut:

- 1) Keselamatan dan Keamanan Pelayaran TSDP;
- 2) Keselamatan dan Keamanan Angkutan di Perairan, Pelabuhan, Perlindungan Lingkungan Maritim.

#### **I.4.2. Anggaran**

Terdapat perbedaan yang cukup besar antara pagu kebutuhan usulan dengan alokasi anggaran, sementara tugas yang diamanahkan begitu besar sehingga Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan terhadap prasarana dan sarana perhubungan darat.

#### **I.4.3. Isu Strategis**

Isu Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara adalah:

1. Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Angkutan Penyeberangan;
2. Penataan dan pembinaan SDM transportasi darat;
3. Perubahan *Mindset* dan *Cultureset* masyarakat, operator terkait prioritas angkutan jalan dan angkutan umum;
4. ODOL (*Over Dimension Over Loading*);
5. Perencanaan anggaran dan proses pengadaan;
6. Uji berkala kendaraan bermotor oleh pemerintah dan swasta.
7. Penganggaran melalui Pembiayaan Non APBN.
8. Pengadaan sarana dan prasarana yang ada di ruas jalan nasional;
9. Pengadaan subsidi perintis Damri yang menjangkau seluruh wilayah kepulauan di Maluku Utara;
10. Peningkatan Konektivitas melalui Pengembangan Sarana dan Prasarana pada Jaringan Lintas Penyeberangan;
11. Peningkatan Kapasitas Jaringan Penyeberangan pada Lintas Utama Mengikuti Perkembangan Peningkatan Kapasitas Jaringan Jalan;

#### **I.4.4. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Laporan Monitoring Capaian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara triwulan I Tahun 2025 adalah:

1. Rencana Strategis
2. Perjanjian Kinerja
3. Indikator Kinerja Program
4. Pengukuran Kinerja
5. Evaluasi Kinerja



## **I.5 SISTEMATIKA LAPORAN**

Laporan Monitoring Capaian Kinerja (LMCK) ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

I.1 Latar Belakang

I.2 Tugas Pokok dan Fungsi

- **Bagan Struktur Organisasi**

I.3 Sumber Daya Manusia

I.4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

I.5 Sistematika Laporan

I.6 Uraian Singkat Perencanaan Strategis

- **Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025**

I.7 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

### **BAB II AKUNTABILITAS KINERJA**

II.1 Tahapan Pengukuran Kinerja

II.2 Pengukuran Capaian Kinerja

**A. SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan antar Transportasi**

- **Uraian Sasaran Program**

**A.1. IKK 1.1 Persentase Keperintisan Angkutan Jalan**

A.1.1. Definisi Indikator Kinerja

A.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

A.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

A.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

**A.2. IKK 1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan**

A.2.1. Definisi Indikator Kinerja

A.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

A.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

A.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

### **A.3. IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi**

A.3.1. Definisi Indikator Kinerja

A.3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

A.3.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

A.3.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

### **B. SK2 Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat**

- **Uraian Sasaran Program**

#### **B.1. IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan SPM di Pelabuhan SDP**

B.1.1. Definisi Indikator Kinerja

B.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

B.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

B.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

### **C. SK3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat**

- **Uraian Sasaran Program**

#### **C.1. IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan yang Terpasang terhadap Kondisi Ideal**

C.1.1. Definisi Indikator Kinerja

C.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

C.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

C.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

#### **C.2. IKK 3.5 Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan**

C.2.1. Definisi Indikator Kinerja

C.2.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

C.2.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

C.2.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

**C.3. IKK 7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**

C.3.1. Definisi Indikator Kinerja

C.3.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

C.3.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

C.3.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

**C.4. IKK 7b Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP**

C.4.1. Definisi Indikator Kinerja

C.4.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

C.4.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

C.4.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

**D. SK4 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat**

- **Uraian Sasaran Program**

**D.1. IKK 4.1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat**

D.1.1. Definisi Indikator Kinerja

D.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

D.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

D.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

**E. SK5 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel**

- **Uraian Sasaran Program**

**E.1. IKK 5.1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat**

E.1.1. Definisi Indikator Kinerja

E.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

E.1.3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

E.1.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

## II.1 Realisasi Anggaran

### II.1.1. Alokasi Anggaran Tahun 2025

#### II.1.1.1 Pagu Anggaran

- a.1 Rincian Per Sumber Dana Tahun 2025
- a.2 Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2025
- a.3 Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran

#### II.1.1.2 *Refocusing* Anggaran Tahun 2025

- a.1 Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2025
- a.2 Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2025
- a.3 Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2025
- a.4 Rincian Realokasi Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

#### II.1.1.3 Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2025 – 2029

### II.1.2. Realisasi Anggaran Tahun 2025

#### II.1.2.1 Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

#### II.1.2.2 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025

#### II.1.2.3 Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025

#### II.1.2.4 Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

### II.1.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

### II.1.4. Hambatan dan Kendala

## **BAB III PENUTUP**

### III.1 Penutup

#### IV.1.1 Ringkasan Capaian

### III.2 Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

## **Lampiran**

1. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
3. Rencana Aksi Tahun 2025;
4. Revisi I Rencana Aksi Tahun 2025;
5. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2025;
6. Lain – lain yang dianggap perlu.



#### I. 6. URAIAN SINGKAT PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara Tahun 2025 - 2029 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara dalam kurun waktu 2025 - 2029 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2025 - 2029 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan Ditjen Hubdat.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja program Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara Tahun 2025 - 2029, sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel I.1** Sasaran dan Indikator Kinerja Program Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara 2025-2029 sesuai Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025 – 2029

| SASARAN KEGIATAN |                                                                                     | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                           | SATUAN | TARGET s/d 2029 |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| (1)              | (2)                                                                                 | (3)                                                                                  | (4)    | (5)             |
| SK1              | Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi | IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional                  | %      | 95              |
|                  |                                                                                     | IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan         | %      | 95              |
|                  |                                                                                     | IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi                                         | Lokasi | 20              |
| SK2              | Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat                                   | IKK 2.3 Persentase pelaksanaan standar pelayanan minimum (SPM) di pelabuhan SDP      | %      | 80              |
| SK4              | Meningkatnya keselamatan transportasi darat                                         | IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal    | %      | 100             |
|                  |                                                                                     | IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan | Orang  | 600             |

| SASARAN KEGIATAN |                                                                          | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                          | SATUAN | TARGET s/d 2029 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| (1)              | (2)                                                                      | (3)                                                                 | (4)    | (5)             |
|                  |                                                                          | IKK 7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor | %      | 100             |
|                  |                                                                          | IKK 7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP | Lokasi | 4               |
| <b>SK5</b>       | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat | IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat | Nilai  | 90              |
| <b>SK1</b>       | Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel                | IKK 1. Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat | Nilai  | 90              |

#### 1.6.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara merupakan kontrak kerja Tahunan antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta Menteri Perhubungan dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2025 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran Rp. 149.931.648.000,- adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2** Rencana Kinerja Tahunan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara Tahun 2025

| SASARAN KEGIATAN |                                                              | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                   | SATUAN | TARGET s/d 2024 |
|------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| (1)              | (2)                                                          | (3)                                                                          | (4)    | (5)             |
| <b>SK1</b>       | Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan | IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional          | %      | 95              |
|                  |                                                              | IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan | %      | 95              |
|                  |                                                              | IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi                                 | Lokasi | 20              |

| SASARAN KEGIATAN |                                                                          | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                           | SATUAN | TARGET s/d 2024 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|
| (1)              | (2)                                                                      | (3)                                                                                  | (4)    | (5)             |
|                  | antarmoda transportasi                                                   |                                                                                      |        |                 |
| SK2              | Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat                        | IKK 2.3 Persentase pelaksanaan standar pelayanan minimum (SPM) di pelabuhan SDP      | %      | 80              |
| SK4              | Meningkatnya keselamatan transportasi darat                              | IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal    | %      | 100             |
|                  |                                                                          | IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan | Orang  | 600             |
|                  |                                                                          | IKK 7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor                  | %      | 100             |
|                  |                                                                          | IKK 7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP                  | Lokasi | 4               |
| SK5              | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat | IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat                  | Nilai  | 90              |
| SK1              | Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel                | IKK 1. Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat                  | Nilai  | 90              |

### 1.6.2 URAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara merupakan kontrak kinerja antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat serta Menteri Perhubungan dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2024 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Kegiatan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara melalui Program Penyelenggaraan dan Pengelolaan Transportasi Darat dengan Total Anggaran Rp. 149.931.648.000,- adalah sebagai berikut:

**Tabel I.3** Perjanjian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Tahun 2025

| SASARAN KEGIATAN |                                                                                     | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                           | SATUAN | TARGET |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| (1)              | (2)                                                                                 | (3)                                                                                  | (4)    | (5)    |
| SK1              | Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi | IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional                  | %      | 92     |
|                  |                                                                                     | IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan         | %      | 100    |
|                  |                                                                                     | IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi                                         | Lokasi | 20     |
| SK2              | Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat                                   | IKK 2.3 Persentase pelaksanaan standar pelayanan minimum (SPM) di pelabuhan SDP      | %      | 100    |
| SK4              | Meningkatnya keselamatan transportasi darat                                         | IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal    | %      | 100    |
|                  |                                                                                     | IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan | Orang  | 150    |
|                  |                                                                                     | IKK 7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor                  | %      | 100    |
|                  |                                                                                     | IKK 7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP                  | Lokasi | 4      |
| SK5              | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat            | IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat                  | Nilai  | 90     |
| SK1              | Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel                           | IKK 1. Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat                  | Nilai  | 85     |

**Kegiatan****Anggaran**

|                                                                       |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| 1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat                      | Rp. | 59.402.219.000 |
| 2. Pelayanan Transportasi Darat                                       | Rp. | 8.485.595.000  |
| 3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat                        | Rp. | 45.979.758.000 |
| 4. Penunjang Teknis Transportasi Darat                                | Rp. | 5.683.025.000  |
| 5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat                  | Rp. | 8.360.316.000  |
| 6. Pengelolaan Perencanaan Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat | Rp. | 22.020.735.000 |



PENDAHULUAN

AKUNTABILITAS  
KINERJA

PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I

BAB II

BAB III



## **BAB II**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja adalah pencapaian kinerja suatu Instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauh mana organisasi tersebut telah melakukan upaya - upaya Strategis dan Operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan Visi dan Misi

---

## 2.1 TAHAPAN PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja. Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web e-Performance yang menyediakan fasilitas inputting, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat <http://www.eperformance.dephub.go.id> dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing.

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dimasa mendatang.

- **Metode Pengukuran**

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Persentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Program adalah sebagai berikut:

- **Persentase Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{(\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}))}{\text{Target}} \times 100 \%$$

- **Pengukuran Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara Tahun 2025**

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi:

1. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan, serta alternatif solusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Program Tahun 2025;
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Target Kinerja Pada Tahun 2025 Dalam Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025-2029.

Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja. Untuk mewujudkan 5 (lima) tujuan strategis kegiatan yang telah ditetapkan dalam Reviu Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara

2025-2029, bermuara pada terwujudnya 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai pada periode 2025-2029.

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Dari hasil pengukuran kinerja dengan menggunakan perbandingan antara target perjanjian kinerja dengan capaian kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara maka diperoleh data Capaian Kinerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara Triwulan I adalah sebesar 78%. Nilai tersebut berasal dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran Kegiatan sebagaimana tampak pada tabel berikut.







Tabel II. 1 Pengukuran Kinerja BPTD Kelas II Maluku Utara Triwulan I Tahun 2025

| Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja Kegiatan                                   |                                                                                                                          | Satuan | Target | TWI            |                   |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------|-------------------|-----------------|
|                                                                              |                                                                                                                          |        |        | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Capaian Kinerja |
| SK1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda   |                                                                                                                          |        |        |                |                   | 48,40%          |
| IKK 1.1                                                                      | Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan nasional                                                              | %      | 92     | 92             | 14                | 15,22%          |
| IKK 1.5                                                                      | Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan                                                     | %      | 100    | 100            | 30                | 30%             |
| IKK 1.6                                                                      | Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi                                                                                     | Lokasi | 20     | 20             | 20                | 100%            |
| SK2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat                        |                                                                                                                          |        |        |                |                   | 100%            |
| IKK 2.3                                                                      | Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP                                                  | %      | 100    | 100            | 100               | 100%            |
| SK4 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat                              |                                                                                                                          |        |        |                |                   | 25%             |
| IKK 3.1                                                                      | Persentase Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Fasilitas Keselamatan Jalan yang telah terpasang terhadap Kondisi Ideal | %      | 100    | 100            | 0                 | 0               |
| IKK 3.5                                                                      | Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan                                             | Orang  | 150    | 150            | 0                 | 0               |
| IKK7a                                                                        | Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                                             | %      | 100    | 100            | 0                 | 0               |
| IKK7b                                                                        | Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayanan SDP                                                             | Lokasi | 4      | 4              | 4                 | 100%            |
| SK5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat |                                                                                                                          |        |        |                |                   | 100%            |
| IKK5.1                                                                       | Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat                                                              | Nilai  | 90     | 90             | 90                | 100%            |
| SK1 Meningkatkan Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel                |                                                                                                                          |        |        |                |                   | 100%            |
| IKK 1                                                                        | Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat                                                             | Nilai  | 80     | 80             | 80                | 100%            |

| Sasaran Kinerja/Indikator Kinerja Kegiatan                                            | Satuan | Target | TWI            |                   |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------|-------------------|-----------------|
|                                                                                       |        |        | Target Kinerja | Realisasi Kinerja | Capaian Kinerja |
| Rata – Rata Persentase Capaian Sasaran Kegiatan                                       |        |        |                |                   | 74,68%          |
| Rata – Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan                             |        |        |                |                   | 54,52%          |
| Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKP ≥ 100%) |        |        |                |                   | 5               |
| Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% (0≤IKP ≤ 100%)                     |        |        |                |                   | 5               |

Selama tahun 2025, ada 5 Sasaran Kegiatan (SK) dan di dalamnya ada 10 IKK Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara. Penjelasan capaian IKK untuk setiap Sasaran Kegiatan adalah sebagai berikut:

**Sasaran Kegiatan 1. Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi**

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara merupakan salah satu Balai di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Reviu Renstra Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara Tahun 2025-2029. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara dalam IKK membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut strategi yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas dan peningkatan angkutan perkotaan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 1.1. Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional
2. IKK 1.5. Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Penyeberangan
3. IKK 1.6 Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi



| SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM |                                                                                            |               |                   |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| <b>SK1</b>                                  | <b>Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi</b> |               |                   |
| <b>IKK 1.1</b>                              | <b>Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional</b>                         | <b>satuan</b> | <b>%</b>          |
|                                             | <b>Target/Realisasi/Capaian</b>                                                            | <b>Tw 1</b>   | <b>Tahun 2025</b> |
|                                             | Target                                                                                     | 92            | 92                |
|                                             | Realisasi                                                                                  | 14            |                   |
|                                             | Capaian                                                                                    | 15,22%        |                   |
| <b>IKK 1.5</b>                              | <b>Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan</b>                | <b>satuan</b> | <b>%</b>          |
|                                             | <b>Target/Realisasi/Capaian</b>                                                            | <b>Tw 1</b>   | <b>Tahun 2025</b> |
|                                             | Target                                                                                     | 100           | 100               |
|                                             | Realisasi                                                                                  | 30,4          |                   |
|                                             | Capaian                                                                                    | 30,4%         |                   |
| <b>IKK 1.6</b>                              | <b>Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi</b>                                                | <b>satuan</b> | <b>Lokasi</b>     |
|                                             | <b>Target/Realisasi/Capaian</b>                                                            | <b>Tw 1</b>   | <b>Tahun 2025</b> |
|                                             | Target                                                                                     | 20            | 20                |
|                                             | Realisasi                                                                                  | 20            |                   |
|                                             | Capaian                                                                                    | 100%          |                   |

### **IKK 1.1 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan Nasional**

#### **a.1. Definisi Indikator Kinerja**

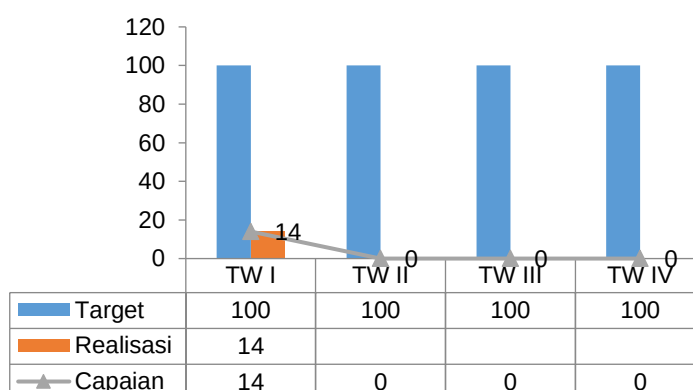
Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan jalan adalah perbandingan antara jumlah pelayanan Angkutan Perintis di Jalan dengan jumlah pelayanan yang direncanakan. Untuk menghitung Indikator Kinerja Pelaksanaan Keperintisan angkutan Jalan digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK\ 1.1 = \frac{Jumlah\ RIT\ realisasi\ pada\ tahun\ (n)}{Jumlah\ RIT\ yang\ direncanakan} \times 100\%$$

#### **a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Triwulan I terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan triwulan I (satu) sebesar 14% jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja tahun 2025 sebesar 92% maka capaian kinerja mencapai 14%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan.

Grafik I.1 Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan  
Jalan Triwulan I Tahun 2025



### a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP-DRJD 5958 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jaringan Trayek Jalan Perintis Tahun 2025, terdapat sebanyak 15 trayek yang di tetapkan di provinsi maluku utara untuk di layani oleh keperintisan angkutan jalan sebagaimana terdapat pada **LAMPIRAN**. Dari total 15 trayek jalan perintis , sebagai berikut.

| NO | ROUTE                                                | TARGET TRIP 1 TAHUN |                  |
|----|------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
|    |                                                      | SEBELUM ADDENDUM    | SETELAH ADDENDUM |
| 1  | Malifut - Kao - Toliwang                             | 576                 | 774              |
| 2  | Tobelo - Galela - Saluta                             | 1.152               | 910              |
| 3  | Tobelo-Loleba                                        | 576                 | 680              |
| 4  | Pasar Fogi - Pelabuhan Ferry Sanana - Pasar Fogi     | 1.152               | 916              |
| 5  | Weda – Saketa                                        | 576                 | 537              |
| 6  | Sofifi - Jalan Km 40 - Kantor Gubernur - Sofifi      | 1.728               | 1.214            |
| 7  | Wayabula - Daruba - Bere Bere - Sopi                 | 576                 | 544              |
| 8  | Weda – Patani                                        | 1.152               | 1.390            |
| 9  | Plb. Penyebrangan Rum - Terminal Sarimalaha          | 1.152               | 696              |
| 10 | Bibinoi - Babang - Wayaua                            | 576                 | 448              |
| 11 | Belang Belang - Labuha - Kubung                      | 576                 | 462              |
| 12 | Terminal Trans Goal - Terminal Jailolo - Desa Susupu | 1.152               | 1.030            |
| 13 | Iga – Subaim                                         | 576                 | 426              |
| 14 | Terminal Fog - Manaf                                 | 1.152               | 834              |
| 15 | Tobelo - Trans Sukamaju                              | 1.152               | 1.171            |

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan terhadap konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi memiliki target 92% yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun Faktor Keberhasilan tercapainya indikator Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional antara lain:

1. Dipengaruhi oleh komitmen antara Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara dan pemerintah daerah dalam kegiatan pengembangan dan peningkatan pelayanan keperintisan angkutan jalan dalam meningkatkan perekonomian di wilayah maluku utara;
2. Masih diperlukannya angkutan keperintisan di daerah yang belum terjangkau oleh angkutan umum;
3. Angkutan keperintisan menjadi salah satu pilihan transportasi yang murah.

- **Faktor Kegagalan**

Adapun Faktor Kegagalan terhadap indikator Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional antara lain:

1. Terjadinya Efisiensi Anggaran mengakibatkan menurunnya pelayanan fasilitas bagi pengguna jasa;
2. Kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan perintis yang telah disediakan;
3. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya angkutan keperintisan;

4. Kendala dalam mendapatkan BBM Bersubsidi karena kelangkaan di beberapa wilayah yang dilayani angkutan perintis sehingga harus menggunakan BBM Non-Subsidi.

- **Realisasi Kinerja**

Untuk menghitung Indikator Kinerja Pelaksanaan Keperintisan angkutan Jalan Nasional digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK\ 1.1 = \frac{\text{Jumlah RIT realisasi pada tahun (n)}}{\text{Jumlah RIT yang direncanakan}} \times 100\%$$

- **Capaian Kinerja**

Capaian Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu tercapainya target perjalanan pulang pergi (rit) dan kebermanfaatan dalam pelayanan. Capaian rit untuk masing-masing trayek dapat dilihat pada tabel berikut:

| NO | ROUTE                                    | TARGET |       | REALISASI |       | PROSENTASE PENCAPAIAN |      |
|----|------------------------------------------|--------|-------|-----------|-------|-----------------------|------|
|    |                                          | Rit    | Pnp   | Rit       | Pnp   | Rit                   | Pnp  |
| 1  | TOLIWANG - TOBELO                        | 74     | 444   | 74        | 103   | 100%                  | 23%  |
| 2  | TOBELO-GALELA-SALUTA-TANJUNG JERE        | 93     | 555   | 93        | 517   | 100%                  | 93%  |
| 3  | TOBELO-JIKOMOI                           | 53     | 315   | 53        | 505   | 100%                  | 160% |
| 4  | PSR.FOGI-PEL.FERY-SANANA-PSR. POGI       | 78     | 468   | 78        | 11    | 100%                  | 2,3% |
| 5  | WEDA - KOBE SAWAI                        | 78     | 468   | 78        | 144   | 100%                  | 31%  |
| 6  | GORUA - BERE-BERE - DARUBA               | 48     | 288   | 48        | 251   | 100%                  | 87%  |
| 7  | WAYABULA-DARUBA                          | 46     | 276   | 46        | 185   | 100%                  | 67%  |
| 8  | WEDA-BISUI                               | 44     | 264   | 44        | 200   | 100%                  | 76%  |
| 9  | PEL.PENYEBERANGAN RUM-TER. SARIMALAHA    | 77     | 462   | 77        | 59    | 100%                  | 13%  |
| 10 | BIBINOI-BABANG-WAYAUUA                   | 42     | 252   | 42        | 75    | 100%                  | 30%  |
| 11 | BELANG BELANG - LABUHA- KUBUNG           | 33     | 198   | 33        | 14    | 100%                  | 7%   |
| 12 | TERM.TRANS GOAL-TERM.JAILOLO-DESA SUSUPU | 79     | 474   | 79        | 300   | 100%                  | 63%  |
| 13 | IGA - SUBAIM                             | 36     | 216   | 36        | 158   | 100%                  | 73%  |
| 14 | TERMINAL FOG - MANAF                     | 76     | 456   | 76        | 15    | 100%                  | 3,3% |
| 15 | TOBELO - TRANS SUKAMAJU                  | 103    | 618   | 103       | 670   | 100%                  | 108% |
|    | TOTAL                                    | 959    | 5.754 | 959       | 3.207 | 100%                  | 56%  |

Terdapat realisasi pelayanan sampai dengan Triwulan I sebesar 959 Rit dengan target pelayanan selama setahun sebesar 6076 Rit. Maka,

$$IKK\ 1.1 = \frac{\text{Jumlah RIT realisasi pada tahun (n)}}{\text{Jumlah RIT yang direncanakan}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi Triwulan I} = \frac{959}{6076} = 15,78$$

Dari data realisasi operasional pelayanan angkutan jalan diatas maka dapat di hitung capaian indikator kegiatan, sebagai berikut:

*Capaian Persentase Layanan Keperintisan Angkutan Jalan*

$$= \frac{15,78}{100} * 100\% = 16\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran terkait pelaksanaan keperintisan angkutan jalan Tahun 2025 yaitu dengan nomenklatur 4637 - Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat dengan nomenklatur 051 – Layanan Angkutan Jalan Perintis (Prioritas Nasional). pagu anggaran sejumlah 8.590.557.000 dengan realisasi hingga Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp 1.460.925.180 atau sebesar 17%

#### **a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait adanya layanan angkutan jalan perintis yang bisa digunakan dengan tarif yang lebih terjangkau;
2. Melakukan pengawasan terhadap operasional angkutan jalan perintis baik dari aspek kelaikan kendaraan dan ketepatan prosedural dalam menjalankan layanan angkutan jalan perintis;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap tingkat load factor keperintisan angkutan jalan agar dapat dilakukan evaluasi terhadap



trayek-trayek yang telah memenuhi ambang batas minimal untuk diubah menjadi trayek komersil;

4. Melakukan usulan permintaan unit baru kendaraan bermotor keperintisan angkutan jalan.

## **IKK1.5 Persentase Pelaksanaan Pelayanan keperintisan Angkutan Penyeberangan**

### **a.1. Definisi Indikator Kinerja**

Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan adalah pelayanan angkutan penyeberangan bersubsidi guna membangun konektivitas antar pulau di Maluku Utara. Pelayanan angkutan penyeberangan perintis menggunakan kapal ferry dari perusahaan PT.ASDP Indonesia Ferry Cabang Ternate. Kegiatan ini berguna untuk mendukung kegiatan perekonomian serta sosial politik masyarakat di wilayah Maluku Utara. Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan adalah perbandingan antara jumlah pelayanan Angkutan penyeberangan Perintis dengan jumlah daerah tertinggal, terpencil dan terluar.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan jumlah total pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan digunakan rumus sebagai berikut:

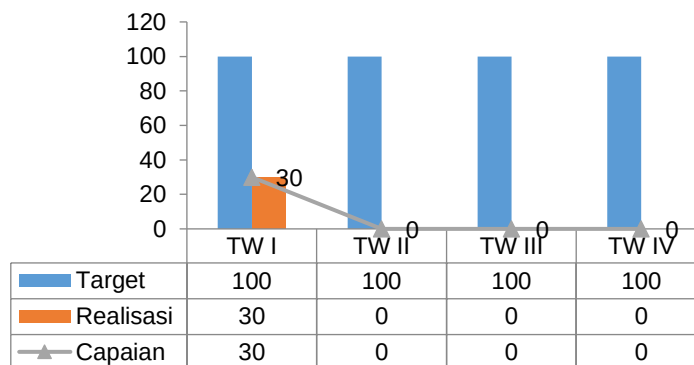
$$IKK\ 1.5 = \frac{\text{Kawasan DTPK yang dilayani angkutan penyeberangan perintis}}{\text{Jumlah Kawasan DTPK yang ditetapkan}} \times 100\%$$

### **a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Triwulan I Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

Realisasi kinerja persentase pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan Triwulan I sebesar 30% jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai

30%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik capaian IKK persentase pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan tahun 2025.

Grafik I.5 Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Penyeberangan  
Triwulan I Tahun 2025



### a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

Sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DJPD 6838 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2025, sebanyak 19 lintasan ditetapkan untuk dilayani Angkutan Penyeberangan Perintis. Dari jumlah lintas tersebut terdapat 19 (Sembilan Belas) lintas penyeberangan yang terlayani Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dalam **Lampiran**. Dari total 19 Lintasan Angkutan Penyeberangan Perintis , sebagai berikut.

| NO | LINTASAN         | TARGET TRIP 1 TAHUN |
|----|------------------|---------------------|
| 1  | DARUBA - DODOLA  | 160                 |
| 2  | DARUBA – KOLORAY | 160                 |
| 3  | DARUBA – ZUM ZUM | 160                 |
| 4  | TOBELO – SUBAIM  | 258                 |
| 5  | DOWORA – SOFIFI  | 258                 |
| 6  | BASTIONG – MOTI  | 136                 |
| 7  | MOTI – MAKIAN    | 136                 |
| 8  | MAKIAN – KAYOA   | 136                 |
| 9  | KAYOA – BABANG   | 135                 |

|    |                       |      |
|----|-----------------------|------|
| 10 | BABANG – SAKETA       | 208  |
| 11 | BABANG – MADAPOLO     | 43   |
| 12 | MADAPOLO – OBI        | 43   |
| 13 | OBI – SANANA          | 39   |
| 14 | SANANA – MANGOLE      | 124  |
| 15 | MANGOLE – BOBONG      | 40   |
| 16 | KUPAL – MADIOLI       | 46   |
| 17 | KUPAL – KASIRUTA      | 88   |
| 18 | KASIRUTA – BOSOWA     | 88   |
| 19 | BASTIONG – BATANG DUA | 20   |
|    | <b>TOTAL</b>          | 2278 |

- **Kronologi Target Perjanjian Kinerja**

Target tahun 2025, indikator kinerja kegiatan persentase pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan terhadap Konektivitas Transportasi Darat Dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi ditetapkan sebesar 100% dan ditargetkan realisasi operasional pelayanannya mencapai 100% setiap bulannya. Target diperoleh berdasarkan arahan pimpinan dengan pertimbangan terhadap realisasi pelayanan pada tahun sebelumnya.

- **Realisasi Kinerja**

Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan adalah perbandingan antara jumlah pelayanan Angkutan penyeberangan Perintis dengan jumlah daerah tertinggal, terpencil dan terluar. Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan jumlah total pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK\ 1.5 = \frac{Jumlah\ Trip\ Realisasi\ angkutan\ Penyeberangan}{Jumlah\ Target\ Trip\ yang\ ditetapkan} \times 100\%$$

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun keberhasilan dalam kegiatan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Adanya peningkatan ekonomi serta peningkatan pembangunan pada daerah terpencil di wilayah maluku utara;

2. Adanya peningkatan perjalanan masyarakat dari satu kabupaten ke kabupaten yang lain;
3. Sebagai mobilisasi yang menghubungkan pulau satu dengan yang lain di maluku utara sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat terpencil di wilayah Provinsi Maluku Utara;
4. Kepastian jam operasional keperintisan angkutan penyeberangan.

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun kendala yang terdapat dalam kegiatan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Keterbatasan sarana angkutan penyeberangan;
2. Jam operasional keperintisan angkutan penyeberangan yang tidak tepat sesuai jadwal;
3. Kondisi cuaca yang tidak menentu menyebabkan pelayanan angkutan penyeberangan tidak optimal;
4. Kerusakan sarana angkutan penyeberangan menyebabkan terputusnya konektivitas antar Kabupaten di wilayah Provinsi Maluku Utara sehingga akan berdampak pada peningkatan perekonomian serta perjalanan masyarakat.

- **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan penyeberangan Triwulan I Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu tercapainya target perjalanan pulang pergi dan kebermanfaatan dalam satu tahun pelayanan.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan digunakan rumus sebagai berikut;

$$IKK\ 1.5 = \frac{Jumlah\ Trip\ Realisasi\ angkutan\ Penyeberangan}{Jumlah\ Target\ Trip\ yang\ ditetapkan} \times 100\%$$

#### Data Realisasi Pelayanan angkutan Penyeberangan

| NO | BULAN     | TARGET TRIP | REALISASI TRIP |
|----|-----------|-------------|----------------|
| 1  | Januari   | 385         | 306            |
| 2  | Februari  | 374         | 311            |
| 3  | Maret     | 348         | 307            |
| 4  | April     |             |                |
| 5  | Mei       |             |                |
| 6  | Juni      |             |                |
| 7  | Juli      |             |                |
| 8  | Agustus   |             |                |
| 9  | September |             |                |
| 10 | Oktober   |             |                |
| 11 | November  |             |                |
| 12 | Desember  |             |                |

Persentase Layanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan adalah sebagai berikut.

$$IKK\ 1.5 = \frac{\text{Jumlah Trip Realisasi angkutan Penyeberangan}}{\text{Jumlah Target Trip yang ditetapkan}} \times 100\%$$

$$IKK\ 1.5 = \frac{924}{2278} \times 100\% = 30$$

- **Capaian Kinerja**

Dari data realisasi diatas, capaian kinerja Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan triwulan I tahun 2025 sebesar 30%. Dimana persentase capaian merupakan hasil realisasi dibagi dengan target. Sehingga Capaian kinerja Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan triwulan I tahun 2025 berhasil mencapai target sebesar 30%.

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran 4637 - Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat dengan nomenklatur 051 – Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis (Prioritas Nasional) terkait Persentase Layanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Tahun 2025 mempunyai pagu anggaran sejumlah Rp. 31.440.116.000 dengan realisasi tahun 2025 sebesar Rp.0 atau sama dengan 0%

**a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melaksanakan pengawasan terhadap operasional pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat;
2. Melaksanakan evaluasi secara berkala terkait pelayanan angkutan penyeberangan perintis;
3. Melakukan addendum target trip pelayanan angkutan penyeberangan jika tidak dapat melaksanakan pelayanan sesuai dengan target awal;
4. Diperlukannya koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan dan kewenangan tarif lintas penyeberangan, penetapan lintas baru, dan evaluasi lintas eksisting.



## **IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi**

### **a.1. Definisi Indikator Kinerja**

Pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan laut yang digunakan untuk angkutan penyeberangan. Pelabuhan penyeberangan adalah Pelabuhan penyeberangan kelas I, kelas II, dan kelas III. Sedangkan, Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan sungai, danau, waduk, dan terusan. Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan pengumpul dan pengumpan. Pelabuhan SDP yang beroperasi merupakan Pelabuhan SDP yang dibangun melalui APBN.

BPTD Kelas II Maluku Utara memiliki Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan SDP yang memiliki fungsi melakukan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf Pelabuhan Penyeberangan terhadap keselamatan transportasi angkutan umum di darat berjalan dengan benar serta mengevaluasi pelaksanaan terkait manajemen SDM, Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi di Provinsi Maluku Utara sebanyak 20 lokasi.

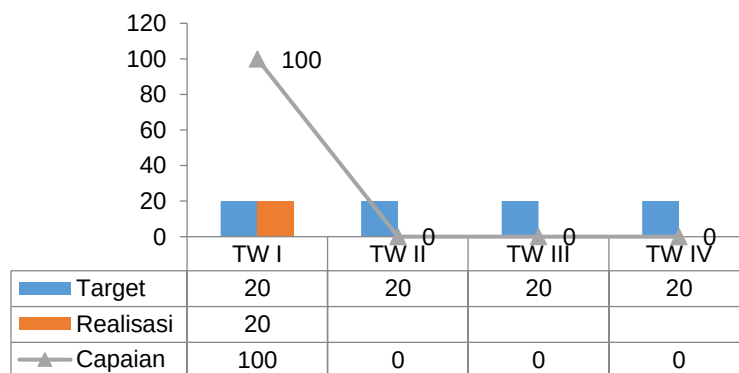
Untuk menghitung Indikator Kinerja jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK1.6 = \text{Jumlah Pelabuhan SDP yang telah selesai dibangun dan dioperasikan s.d tahun } (n)$$

### a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Triwulan I terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi triwulan I tahun 2025 sebesar 20 lokasi jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja 2025 sebesar 20 lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik III.3 Grafik Capaian IKK jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi tahun 2025

Grafik I.6 Persentase Jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi Triwulan I tahun 2025



### a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, BPTD Kelas II Maluku Utara terdapat 17 (tujuh belas) Pelabuhan Penyeberangan ASDP, namun sampai dengan tahun 2025 terdapat 21 (dua puluh satu) Pelabuhan Penyeberangan ASDP yang beroperasi sesuai dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

## Daftar Pelabuhan Penyeberangan Provinsi Maluku Utara

DAFTAR REKAPAN PELABUHAN PENYEBERANGAN YANG BEROPERASI  
DI PROVINSI MALUKU UTARA  
TAHUN 2025

| NO | NAMA PELABUHAN | PENGELOLA                | KETERANGAN |
|----|----------------|--------------------------|------------|
| 1  | PP. Bastiong   | PT. ASDP                 | BEROPERASI |
| 2  | PP. Rum        | PT. ASDP                 | BEROPERASI |
| 3  | PP. Sidangole  | PT. ASDP                 | BEROPERASI |
| 4  | PP. Batang Dua | PEMKOT TERNATE           | BEROPERASI |
| 5  | PP. Moti       | PEMKOT TERNATE           | BEROPERASI |
| 6  | PP. Dowora     | PEMKOT TIDORE KEPULAUAN  | BEROPERASI |
| 7  | PP. Sofifi     | PEMKOT TIDORE KEPULAUAN  | BEROPERASI |
| 8  | PP. Daruba     | BPTD KLS II MALUKU UTARA | BEROPERASI |
| 9  | PP. Weda       | BPTD KLS II MALUKU UTARA | BEROPERASI |
| 10 | PP. Tobelo     | PEMKAB HALMAHERA UTARA   | BEROPERASI |
| 11 | PP. Subaim     | PEMKAB HALMAHERA TIMUR   | BEROPERASI |
| 12 | PP. Patani     | PEMKAB HALMAHERA TENGAH  | BEROPERASI |
| 13 | PP. Makian     | PEMKAB HALMAHERA SELATAN | BEROPERASI |
| 14 | PP. Kayoa      | PEMKAB HALMAHERA SELATAN | BEROPERASI |
| 15 | PP. Babang     | PEMKAB HALMAHERA SELATAN | BEROPERASI |
| 16 | PP. Saketa     | PEMKAB HALMAHERA SELATAN | BEROPERASI |
| 17 | PP. Obi        | PEMKAB HALMAHERA SELATAN | BEROPERASI |
| 18 | PP. Sanana     | PEMKAB KEPULAUAN SULA    | BEROPERASI |
| 19 | PP. Mangole    | PEMKAB KEPULAUAN SULA    | BEROPERASI |
| 20 | PP. Bobong     | PEMKAB PULAU TALIABU     | BEROPERASI |
| 21 | PP. Gebe       | PEMKAB HALMAHERA TENGAH  | BEROPERASI |

- **Kronologi Target**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan jumlah Pelabuhan SDP yang Beroperasi terhadap konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi memiliki target 20 Lokasi dengan berdasarkan arahan pimpinan sesuai dengan DIPA Tahun 2025.

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun keberhasilan dalam kegiatan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Sebagai prasarana sandar angkutan penyeberangan;
2. Sebagai tempat intra dan antar moda transportasi;
3. Operasional Pelabuhan yang baik dan teratur.

- **Faktor Kegagalan**

Adapun kendala terdapat dalam kegiatan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Pelabuhan penyeberangan memiliki fasilitas yang tidak memadai dan tidak memberikan rasa nyaman kepada pengguna jasa;
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang ada dalam melaksanakan tugas dan fungsi operasional Pelabuhan Penyeberangan;

3. Pemeliharaan fasilitas Pelabuhan yang kurang maksimal menyebabkan Kerusakan prasarana pada pelabuhan penyeberangan di wilayah Maluku utara.

- **Realisasi Kinerja**

Jumlah eksisting pelabuhan penyeberangan yang berada di wilayah Maluku utara berjumlah 22 (dua puluh dua) pelabuhan penyeberangan diantaranya terdapat 20 (dua puluh) pelabuhan penyeberangan yang beroperasi dan 2 (dua) pelabuhan penyeberangan yang tidak beroperasi. Dari 20 (dua puluh) pelabuhan penyeberangan hanya terdapat 2 (dua) pelabuhan yang berada di bawah unit kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara.

1. Pelabuhan Penyeberangan Daruba, Morotai;
2. Pelabuhan Penyeberangan Weda, Halmahera Tengah.

Realisasi indikator kinerja jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi sebesar 20 (dua puluh) Lokasi dengan target indikator kinerja sebesar 20 lokasi. Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKK I.6} = \frac{\text{Jumlah Pelabuhan SDP yang telah selesai dibangun dan dioperasikan s.d tahun}(n)}{\text{Target}}$$

Sehingga,

$$\text{IKK 1.6} = \frac{20 \text{ lokasi Pelabuhan penyeberangan}}{20 \text{ lokasi}}$$

- **Capaian Kinerja**

Dari data realisasi indikator kinerja diatas maka dapat dihitung capaian indikator kegiatan, sebagai berikut:

$$\text{IKK I.6} = \frac{\text{Jumlah Pelabuhan SDP yang telah selesai dibangun dan dioperasikan s.d tahun}(n)}{\text{Target}}$$

Sehingga,

IKK 1.6 = 20 lokasi Pelabuhan penyeberangan

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Pelabuhan SDP yang beroperasi Triwulan I Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\text{Presentase Capaian} = 20/20 \times 100\% = 100\%$$

- **Realisasi anggaran**

Adapun anggaran 4638 - Pelayanan Transportasi Darat dengan nomenklatur 051 - Operasional Pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan terkait Jumlah Pelabuhan yang beroperasi dengan pagu anggaran senilai Rp. 3.037.018.000 dengan realisasi Triwulan I Tahun 2025 senilai Rp 713.500.000 sehingga capaian sebesar 23%

**a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan pembenahan operasional dan perbaikan bisnis proses yang makin efektif dan efisien;
2. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Prasarana terkait permintaan anggaran Dana Alokasi Khusus untuk melaksanakan pemeliharaan bangunan pelabuhan penyeberangan di wilayah maluku utara;
3. Melaksanakan pengawasan operasional serta evaluasi kinerja pada Pelabuhan penyeberangan secara berkala;
4. Mewujudkan pembangunan pelabuhan yang terpadu dengan moda transportasi lainnya.

## Sasaran Kegiatan 2 : Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat

Dalam menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 2 (dua) Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat menggunakan 1 (satu) IKK, yaitu:

1. IKK 2.3 Persentase pelaksanaan standar pelayanan minimum (SPM) di Pelabuhan SDP;

| SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM |                                                                         |        |            |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| SK2                                         | Meningkatkan Pelayanan Transportasi Darat                               |        |            |
| IKK 2.3                                     | Persentase pelaksanaan standar pelayanan minimum (SPM) di Pelabuhan SDP | satuan | Lokasi     |
|                                             | Target/Realisasi/Capaian                                                | Tw 1   | Tahun 2025 |
|                                             | Target                                                                  | 100%   | 100%       |
|                                             | Realisasi                                                               | 100%   |            |
|                                             | Capaian                                                                 | 100%   |            |

### IKK 2.3 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP

#### a.1 Definisi Indikator Kinerja

Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelabuhan Penyeberangan sebagai tempat pelayanan jasa angkutan penyeberangan, wajib juga memenuhi SPM yang telah ditentukan dalam ketentuan perundangan yang berlaku guna memastikan kenyamanan dan keamanan pengguna jasa. Adapun BPTD Maluku Utara sebagai pengawas pemenuhan SPM di Pelabuhan SDP juga bersinergi dengan para operator Pelabuhan SDP yang ada di wilayah Maluku Utara untuk memeriksa dan mengevaluasi pemenuhan SPM pada pelabuhan-pelabuhan SDP yang ada di wilayah Maluku Utara tersebut.

Untuk menghitung persentase Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP dapat menggunakan rumus berikut:

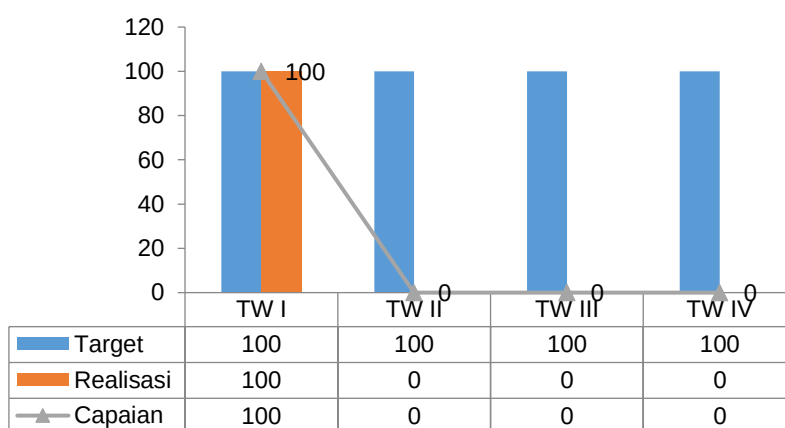


$$IKK2.3 = \frac{\text{jumlah pelabuhan yang memenuhi SPM}}{\text{jumlah pelabuhan yang dipantau}} \times 100\%$$

## a.2 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Triwulan I terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Persentase pelaksanaan standar pelayanan minimum (SPM) di Pelabuhan SDP triwulan I tahun 2025 sebanyak 100% jika dibandingkan dengan target pada perjanjian kinerja 2025 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 100%.

Grafik II.3 Capaian IKK Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP Tahun 2025



Berikut ini rincian capaian setiap triwulan untuk Persentase pelaksanaan standar pelayanan minimum (SPM) di Pelabuhan SDP BPTD Kelas II Maluku Utara.

### **a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan**

- **Dasar Hukum**

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan minimal. untuk meningkatkan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keteraturan dalam penyelenggaraan angkutan penyeberangan, perlu disusun standar pelayanan minimal. BPTD Maluku Utara melakukan pengawasan SPM pada setiap pelabuhan penyeberangan perintis maupun komersial dan berkoordinasi dengan dinas perhubungan.

Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) pelabuhan SDP merupakan persentase persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh Operator Pelabuhan penyeberangan dalam memberikan pelayanan untuk meningkatkan aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan, dan keteraturan dalam penyelenggaraan angkutan penyeberangan.

- **Kronologi Target**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) pelabuhan SDP terhadap Meningkatkan Pelayanan Transportsi Darat memiliki target 100%, hal ini berdasarkan arahan pimpinan dengan melihat realisasi tahun sebelumnya untuk optimalkan kenyamanan bagi para pengguna jasa.

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun keberhasilan pada kegiatan SPM Pelabuhan Penyeberangan sebagai berikut.

1. Komitmen pemerintah pusat dalam program pengembangan dan peningkatan pelayanan Pelabuhan SDP menggunakan Dana Alokasi Khusus untuk meningkatkan kenyamanan kepada pengguna jasa;
2. Terpenuhinya beberapa fasilitas di Pelabuhan Penyeberangan sehingga memberikan kenyamanan bagi pengguna jasa;
3. Operasional Pelabuhan penyeberangan berjalan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan.

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun kegagalan pada kegiatan SPM Pelabuhan Penyeberangan sebagai berikut.

1. Minimnya pelayanan fasilitas yang memadai di pelabuhan penyeberangan sehingga memberikan ketidaknyamanan bagi pengguna jasa;
2. Tidak ada tindak lanjut mengenai hasil setelah dilakukannya Standar Pelayanan Minimum (SPM);
3. Prasarana Pelabuhan yang mengalami kerusakan sehingga memberikan rasa tidak nyaman bagi pengguna jasa.

- **Realisasi Kinerja**

Realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 pada Perjanjian kinerja tahun 2025 adalah sebesar 100% jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2025 sebesar 100% maka capaian kinerja sebesar 100%. Pada tahun 2025 BPTD Maluku utara menetapkan target pelaksanaan SPM di 20 (dua puluh) Pelabuhan penyeberangan dengan realisasi 100%. Dari data realisasi indikator kinerja diatas maka dapat dihitung capaian indikator kegiatan, sebagai berikut:

Untuk menghitung persentase Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP dapat menggunakan rumus berikut:

$$\text{IKK 2.3} = \frac{\text{Jumlah Pelabuhan yang telah dilaksanakan SPM}}{\text{Target Pelabuhan yang dilaksanakan SPM}} \times 100\%$$

$$\text{IKK 2.3} = \frac{20 \text{ Pelabuhan}}{20 \text{ Pelabuhan}} \times 100\% = 100\%$$

- **Capaian Kinerja**

Sehingga capaian indikator kinerja triwulan I tahun 2025 adalah :

$$\text{IKK 2.3} = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran 4640 – Pemantauan dan Evaluasi dengan nomenklatur 923- pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terkait Monitoring dan Pengawasan Pemenuhan SPM kapal dan Pelabuhan Penyeberangan pagu anggaran senilai Rp. 68.500.000 dengan realisasi Triwulan I Tahun 2025 senilai Rp 0 maka capaian sebesar 100%.

**a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melaksanakan monitoring dan pengecekan secara rutin terhadap fasilitas dan pengoperasian yang ada di pelabuhan SDP;
2. Meningkatkan dan memenuhi fasilitas yang memadai di Pelabuhan Penyeberangan guna kenyamanan pengguna jasa.
3. Melakukan koordinasi dengan Direktorat terkait perihal pemeliharaan bangunan Pelabuhan penyeberangan.
4. Melakukan sosialisasi kepada operator kapal terkait standar pelayanan minimal pelabuhan SDP.

### Sasaran Kegiatan 3. Meningkatkan keselamatan transportasi darat

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3 diukur melalui 8 (delapan) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 3.1. Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal
2. IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan
3. IKK 7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor
4. IKK 7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP

Masing-masing pencapaiannya sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

| SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM |                                                                                     |                 |                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| SK4                                         | Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat                                         |                 |                   |
| IKK 3.1                                     | <b>Persentase Perlengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap kondisi Ideal</b>    | <b>satuan :</b> | <b>%</b>          |
|                                             | <b>Target/Realisasi/Capaian</b>                                                     | <b>Tw 1</b>     | <b>Tahun 2025</b> |
|                                             | Target                                                                              | 100%            | 100%              |
|                                             | Realisasi                                                                           | 0               |                   |
|                                             | Capaian                                                                             | 0%              |                   |
| IKK 3.5                                     | <b>Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi jalan</b> | <b>satuan :</b> | <b>Orang</b>      |
|                                             | <b>Target/Realisasi/Capaian</b>                                                     | <b>Tw 1</b>     | <b>Tahun 2025</b> |
|                                             | Target                                                                              | 150             | 150               |
|                                             | Realisasi                                                                           | 0               |                   |
|                                             | Capaian                                                                             | 0               |                   |
| IKK 7a                                      | <b>Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan</b>                          | <b>Satuan :</b> | <b>%</b>          |
|                                             | <b>Target/Realisasi/Capaian</b>                                                     | <b>Tw 1</b>     | <b>Tahun 2025</b> |
|                                             | Target                                                                              | 100             | <b>100</b>        |
|                                             | Realisasi                                                                           | 0               |                   |
|                                             | Capaian                                                                             | 0%              |                   |
| IKK 7b                                      | <b>Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran SDP</b>                 | <b>Satuan :</b> | <b>Lokasi</b>     |
|                                             | <b>Target/Realisasi/Capaian</b>                                                     | <b>Tw 1</b>     | <b>Tahun 2025</b> |
|                                             | Target                                                                              | 4               | <b>4</b>          |
|                                             | Realisasi                                                                           | 4               |                   |
|                                             | Capaian                                                                             | 100%            |                   |

### **IKK 3.1 Persentase Perlengkapan Jalan yang telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal**

#### **a.1. Definisi Indikator Kinerja**

Kebutuhan Perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pemenuhan kebutuhan Perlengkapan Jalan merupakan perhitungan dari 9 (Sembilan) item Perlengkapan Jalan dengan satuan yang berbeda. Adapun 9 (Sembilan) item dimaksud meliputi:

1. Marka Jalan;
2. Rambu Lalu Lintas;
3. Patok Lalu Lintas;
4. Paku Jalan;
5. Pagar Pengaman Jalan;
6. Alat Penerangan Jalan;
7. Lampu Peringatan Pemakai Jalan;
8. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
9. Cermin Tikungan.

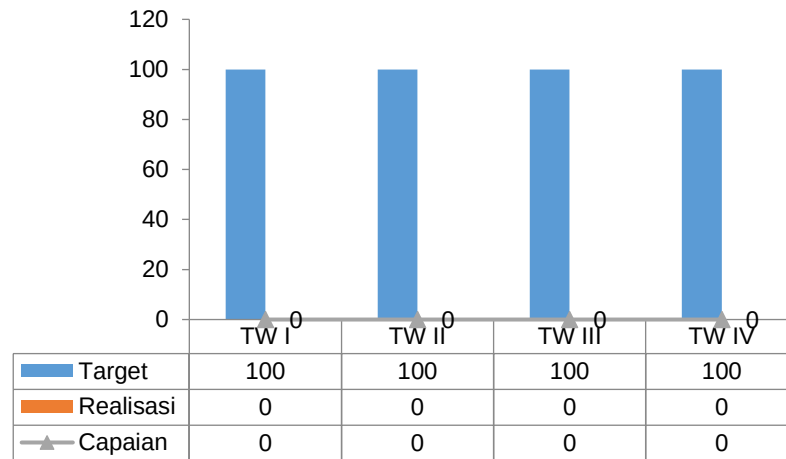
Jaringan jalan nasional Berdasarkan KP 290/KPTS/M/2015. Untuk menghitung Indikator Kinerja Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK\ 4.1 = \frac{Jumlah\ perlengkapan\ jalan\ yang\ terpasang}{Jumlah\ kebutuhan\ perlengkapan\ jalan} \times 100\%$$

#### **a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Triwulan I terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

Realisasi kinerja persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal triwulan I tahun 2025 sebesar 0% jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja tahun 2025 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal.

Grafik III.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal Triwulan I



Pada triwulan I, target persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal yang ditetapkan sebesar 100%. Realisasi perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada triwulan I sebesar 0%. Sehingga capaian perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal sebesar 0%.

### a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Berdasarkan peraturan Direktorat Perhubungan Darat Nomor SK 4303/AJ.002/DRJD/2017 tentang petunjuk teknis pemeliharaan perlengkapan jalan. Sesuai dengan surat perjanjian kontrak pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan nomor: PL.107/2/11/BPTD KLS.II-MALUT/2024.

- **Kronologi Target**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Kegiatan Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal terhadap Keselamatan transportasi darat memiliki target 100% yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.



- **Keberhasilan kegiatan :**

Adapun keberhasilan dalam kegiatan sebagai berikut.

1. Tahapan proses kegiatan pelaksanaan pengadaan perlengkapan jalan sesuai dengan timeline yang telah ditentukan;
2. Telah dilaksanakan kegiatan MC 0% (Mutual check nol) di setiap jenis pengadaan perlengkapan jalan untuk mengetahui setiap perbandingan antara volume kontrak kerja dengan kajian atau perhitungan teknis;
3. Telah dilaksanakan rapat koordinasi PCM (Pre Construction Meeting) antara PPK dan Pihak penyedia;
4. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan sebagai penunjang keselamatan pengguna jasa di jalan nasional di wilayah maluku utara

- **Kegagalan kegiatan :**

Adapun kendala dalam kegiatan ini .

1. Kemungkinan adanya perbedaan spesifikasi teknis dengan yang telah dicantumkan dalam E-Katalog saat penerimaan barang perlengkapan jalan;
2. Keterlambatan pengiriman bahan dari pihak penyedia menuju lokasi pemasangan;
3. Kondisi tanah pada titik pemasangan yang tidak stabil;
4. Kondisi cuaca pada saat pemasangan perlengkapan jalan seperti hujan bisa menjadi penghambat pada saat proses pemasangan;
5. Titik koordinat kurang akurat akibat jaringan internet yang tidak stabil pada wilayah tertentu saat dilakukan Survey MC0% (Mutual check nol) dengan GPS Garmin;
6. Masih banyak perlengkapan jalan yang hilang dan dirusak masyarakat tidak bertanggungjawab;

- **Realisasi Kinerja**

Realisasi kinerja persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada triwulan I ditargetkan 100% dengan target setahun sebesar 100%, dalam pelaksanaan pada triwulan I realisasi indikator kinerja ini sebesar 0%.

- **Capaian Kinerja**

Sehingga capaian kinerja adalah

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Jumlah pemasangan perlengkapan jalan}}{\text{Target Jumlah pemasangan perlengkapan jalan}}$$

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{0}{100} = 0\%$$

- **Realisasi anggaran**

Adapun anggaran 4639 – Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat dengan nomenklatur 052 – perlengkapan jalan terkait pengadaan perlengkapan jalan dengan pagu anggaran senilai Rp. 41.349.665.000 dengan realisasi anggaran hingga Triwulan I senilai Rp. 0 maka capaian sebesar 0%;

**a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Membuat perencanaan pemasangan perlengkapan jalan berdasarkan skala prioritas pemasangan pada daerah rawan kecelakaan;
2. Melaksanakan survey lokasi kebutuhan pemasangan perlengkapan jalan;
3. Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota terkait pembahasan kebutuhan perlengkapan jalan pada titik – titik jalan pertemuan;
4. Melaksanakan pengawasan secara berkala terhadap fasilitas perlengkapan jalan yang telah terpasang.

### **IKK 3.5 Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi tentang Keselamatan Transportasi Jalan**

#### **a.1. Definisi Indikator Kinerja**

Sosialisasi keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi.

Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang diselenggarakan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan dan BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat).

Jumlah masyarakat dihitung berdasarkan laporan pelaksanaan disetiap Balai Pengelola Transportasi Darat dan pelaksanaan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan.

BPTD Kelas II Maluku utara memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan himbauan Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada para masyarakat melalui kegiatan pekan nasional keselamatan jalan. Capaian kinerja Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan dihitung berdasarkan perbandingan realisasi fisik dan target yang telah ditetapkan.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi tentang Keselamatan Transportasi Jalan digunakan rumus sebagai berikut:

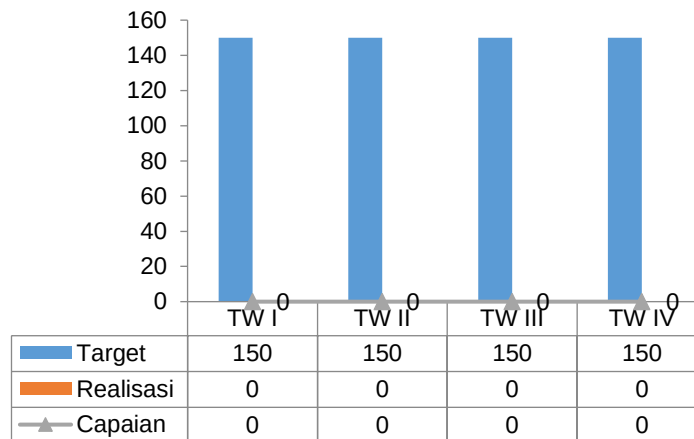
*IKK4.5 = Jumlah kumulatif masyarakat yang mendapat sosialisasi pada PNKJ*

#### **a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja triwulan I terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

Realisasi kinerja Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi tentang Keselamatan Transportasi Jalan triwulan I tahun 2025 sebesar 0 orang jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja tahun 2025 sebesar 150 orang sehingga

capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi tentang Keselamatan Transportasi Jalan tahun 2025

Grafik III.5 Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi tentang Keselamatan Transportasi Jalan Triwulan I



Pada triwulan I, target jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan yang ditetapkan sebesar 150 orang. Realisasi jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan pada triwulan I sebesar 0 orang. Sehingga capaian jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan sebesar 0%. Kegiatan ini direncanakan pada triwulan III tahun 2025 jika anggaran yang diblokir telah di buka sehingga capaian kinerja akan tercapai di Triwulan III.

### a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan bagian empat tentang budaya keamanan dan keselamatan lalu lintas angkutan jalan pasal 208 tentang Budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan Ayat 2 Butir b "Sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program keamanan dan keselamatan lalu lintas dan

angkutan jalan serta Sosialisasi mengenai keselamatan transportasi jalan bisa dipedomani melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pekan Keselamatan Jalan.

- **Kronologi Target**

Target jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan BPTD Kelas II Maluku Utara Tahun 2025-2029 selalu berubah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, sehingga untuk mencapai target PK di tahun 2025 maka dibuat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 150 orang sesuai dengan arahan pimpinan serta pertimbangan ketersediaan anggaran.

- **Analisa keberhasilan**

Adapun keberhasilan kegiatan ini sebagai berikut.

1. Memberikan pengetahuan tentang berlalu lintas yang berkeselamatan kepada kepada murid – murid PAUD/TK, SD, SMP, SMA atau masyarakat umum;
2. Menumbuhkembangkan etika berlalu lintas di jalan;
3. Membantu mengurangi kejadian kecelakaan pada anak usia remaja;
4. Masyarakat tersosialisasi dan mendapatkan informasi tentang keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan pekan nasional keselamatan jalan.

- **Analisa kegagalan**

Adapun kegagalan kegiatan ini sebagai berikut.

1. Sosialisasi belum dilaksanakan sampai dengan bulan maret dikarenakan anggaran masih di blokir pada POK tahun anggaran 2025;
2. Kurangnya kesadaran masyarakat atas pentingnya informasi keselamatan di jalan.

- **Realisasi Kinerja**

Untuk menghitung Indikator Kinerja Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi tentang Keselamatan Transportasi Jalan digunakan rumus sebagai berikut:

*IKK4.5 = Jumlah kumulatif masyarakat yang mendapat sosialisasi pada PNKJ*

Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Masyarakat yang Tersosialisasi tentang Keselamatan Transportasi Jalan adalah

$$IKK4.5 = 0 \text{ orang}$$

- **Capaian Kinerja**

Sehingga capaian kinerja ini sebesar .

$$0 \text{ orang} / 100 \text{ orang} * 100 = 0\%$$

- **Realisasi anggaran**

Adapun anggaran 4639 – Keselamatan Dan Keamanan Transportasi Darat dengan nomenklatur 051- Pekan Nasional Keselamatan Jalan pagu anggaran senilai Rp. 350.000.000 dengan realisasi Triwulan I Tahun 2025 senilai Rp 0 maka capaian sebesar 0%.

**a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Mengusulkan anggaran pada tahun berikutnya;
2. Menambah jumlah masyarakat yang tersosialisasi;
3. Melakukan pengadaan peralatan sosialisasi;
4. Melakukan bimtek kepada tim sosialisasi keselamatan.

### **IKK 3.7a Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**

#### **a.1 Definisi Indikator Kinerja**

Standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor adalah pemberian akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.4404/AJ.502/DRJD/2020. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor merupakan persentase jumlah kumulatif Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) yang telah terakreditasi baik milik pemerintah daerah maupun swasta sampai dengan tahun ke n dibandingkan dengan jumlah Pemerintah Daerah di wilayah Maluku Utara dan jumlah Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) milik pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang dimaksud adalah Pemda Seluruh Pemerintah Kota dan Seluruh Pemerintah Kabupaten di Maluku Utara.

Untuk menghitung persentase kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor dapat menggunakan rumus berikut:

$$\begin{array}{l} \% \text{ Persentase} \\ \text{standarisasi} \\ \text{pengujian berkala} \\ \text{kendaraan bermotor} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah pengujian berkala kendaraan} \\ \text{bermotor} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah Total standarisasi pengujian} \\ \text{berkala kendaraan bermotor} \end{array}} \times 100\%$$

#### **a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

Realisasi Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor Triwulan I tahun 2025 sebesar 0% jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 sebesar 100% maka capaian kinerja mencapai 0%.



Grafik III.7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor  
Triwulan I



Pada triwulan I, target persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor yang ditetapkan sebesar 0%. Realisasi persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor pada triwulan I sebesar 0%. Sehingga capaian persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor sebesar 0%.

### a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian berkala kendaraan bermotor, Kendaraan wajib Uji Berkala wajib didaftarkan pada unit pelaksana Uji Berkala di daerah tempat Kendaraan Bermotor diregistrasi. Kendaraan wajib Uji Berkala wajib dilakukan Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 pada unit pelaksana Uji Berkala di daerah tempat Kendaraan diregistrasi.

Standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor bisa dipedomani melalui Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.4404/AJ.502/DRJD/2020 Tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor tanggal 21 September 2020.

- **Kronologi Target**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor terhadap Keselamatan transportasi darat memiliki target 100% yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

- **Faktor keberhasilan:**

Adapun keberhasilan kegiatan ini sebagai berikut.

1. Peningkatan pelaksanaan pengujian berkala kendaraan angkutan umum di daerah melalui Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor;
2. Meningkatkan keselamatan dan keamanan melalui pengujian kendaraan bermotor secara berkala;
3. Kegiatan Kalibrasi permintaan dari kabupaten yang ada di Maluku utara sudah dilaksanakan.
4. Fasilitas pengujian berkala kendaraan bermotor yang memadai.

- **Faktor kegagalan:**

Adapun kendala dalam kegiatan ini sebagai berikut.

1. Pemerintah Kab/Kota tidak tepat waktu dalam hal pembayaran PNPB kalibrasi alat uji kendaraan bermotor sehingga jarak dari pengajuan permohonan sampai dengan pelaksanaan menjadi lebih lama;
2. Terbatasnya anggaran dari Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pengadaan alat uji baru;
3. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) Petugas Kalibrasi Alat Uji Kendaraan Bermotor berdasarkan kualifikasi pengujian;

- **Realisasi Kinerja**

Realisasi kinerja pada triwulan I tahun 2025 sebesar 0% dibandingkan dengan target kinerja tahun 2025 sebesar 100% sehingga capaian sebesar 0% .

$$\begin{array}{l} \text{\% Persentase} \\ \text{standarisasi} \\ \text{pengujian berkala} \\ \text{kendaraan bermotor} \end{array} = \frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah pengujian berkala kendaraan} \\ \text{bermotor} \end{array}}{\begin{array}{l} \text{Jumlah Total standarisasi pengujian} \\ \text{berkala kendaraan bermotor} \end{array}} \times 100\%$$

$$\text{IKK 7.a} = \frac{2 \text{ Unit UPUBKB pemda yang lulus akreditasi}}{2 \text{ Unit UPUBKB}} = 100\%$$

- **Capaian Kinerja**

Capaian Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor.

% Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor.

$$\frac{0}{100} \times 100 = 0\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran 923 – pemantauan dan evaluasi serta pelaporan terkait Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor pagu anggaran senilai Rp 73.296.000 dengan realisasi Triwulan I Tahun 2025 senilai Rp 0 sehingga capaian sebesar 0%

#### **a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

upaya untuk meningkatkan capaian di masa depan:

1. Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dapat mengusulkan anggaran pengadaan pembangunan gedung uji dan alat uji atau membuat action plan untuk beberapa tahun kedepan;
2. Melaksanakan Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) diseluruh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara;
3. Melakukan koordinasi dengan kepolisian RI untuk penindakan terhadap biro jasa yang menerbitkan *ebblue* palsu;
4. Mensosialisasikan program Pendidikan dan Pelatihan Penguji Kendaraan Bermotor kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara.

## **IKK 7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP**

### **a.1. Definisi Indikator Kinerja**

Berdasarkan PM 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau, alur pelayaran adalah perairan sungai dan danau, muara sungai, alur yang menghubungkan 2 (dua) atau lebih antara muara sungai yang merupakan satu kesatuan alur-pelayaran sungai dan yang dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari. Alur pelayaran sungai dan danau ditetapkan melalui SK Menteri Perhubungan.

BPTD Kelas II Maluku Utara memiliki tugas dan fungsi yang bertujuan untuk menginventaris kebutuhan fasilitas keselamatan di SDP dan membangun dan memfasilitasi infrastruktur keselamatan di SDP serta melakukan monitoring terhadap fasilitas SDP yang telah terpasang.

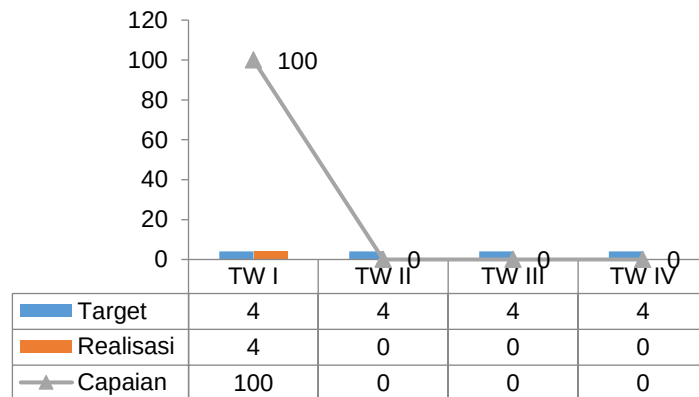
Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP digunakan rumus sebagai berikut:

$$IKK4.7 = \text{Jumlah fasilitas keselamatan yang terbangun s.d tahun } (n)$$

### **a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Triwulan I terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

Realisasi kinerja Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP triwulan I sebesar 4 lokasi jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2025 sebesar 4 lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP triwulan I tahun 2025.

Gambar III.7b Grafik Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP triwulan I



### a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Berdasarkan peraturan menteri perhubungan nomor 25 tahun 2011 tentang sarana bantu navigasi pelayaran, Hampir seluruh Pelabuhan Penyeberangan di Provinsi Maluku utara telah memiliki fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP sehingga terjaminnya keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan di alur pelayaran sungai dan danau.

- **Kronologi Target**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP terhadap Keselamatan transportasi darat memiliki target 4 lokasi yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

- **Faktor keberhasilan**

Adapun keberhasilan kegiatan ini sebagai berikut.

1. Terpasangnya fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP;
2. Fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP berfungsi dengan baik;
3. Meningkatkan keselamatan pada alur pelayaran di Pelabuhan penyeberangan.

- **Faktor kegagalan**

Adapun kendala dalam kegiatan ini sebagai berikut.

1. Tidak tersedianya fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP pada Pelabuhan penyeberangan;
2. Terdapat fasilitas keselamatan alur pelayaran yang tidak berfungsi pada Pelabuhan penyeberangan;
3. Terjadinya kecelakaan angkutan penyeberangan pada saat pelayanan malam hari dikarenakan tidak terdapat fasilitas pelayaran di Pelabuhan.

- **Realisasi Kinerja**

Kegiatan Jumlah Ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP untuk di tahun 2025 terdapat 4 lokasi yang sudah terpasang dan termasuk Aset BPTD Kelas II Maluku Utara. Untuk menghitung Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP digunakan rumus sebagai berikut.

*IKK4.7 = Jumlah fasilitas keselamatan yang terbangun s.d tahun (n)*

$$IKK\ 7b = 4\ Unit$$

- **Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian kinerja pada jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

Capaian Kinerja Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP sebesar:

$$4/4 \times 100 = 100\%$$

**a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

1. Melakukan inventarisasi fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP;
2. Melakukan monitoring fasilitas SBNP secara berkala.
3. Mengusulkan anggaran Pembangunan SBNP pada wilayah yang belum tersedia SBNP.

## **Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 5 di ukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu: IKK 1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

| SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM |                                                                          |        |            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| SK5                                         | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat |        |            |
| IKK 5.1                                     | Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat              | satuan | Nilai      |
|                                             | Target/Realisasi/Capaian                                                 | Tw 1   | Tahun 2025 |
|                                             | Target                                                                   | 90     | 90         |
|                                             | Realisasi                                                                | 90     |            |
|                                             | Capaian                                                                  | 100%   |            |

### **IKK 1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat**

#### **a.1. Definisi Indikator Kinerja**

Aspek penilaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat terdiri dari:

a. Aspek Perencanaan

Aspek perencanaan dinilai berdasarkan ketepatan waktu penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan yang terdiri dari: dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), penginputan aplikasi e-performance.

b. Aspek Kepegawaian (SDM);

Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan disiplin.

c. Aspek Keuangan;

Aspek keuangan dinilai berdasarkan tingkat penyerapan anggaran masing-masing satuan kerja. Sedangkan,

d. Aspek Penyelenggaraan Perkantoran (umum)

aspek penyelenggaraan perkantoran dinilai berdasarkan hasil survei indeks kepuasan pegawai satuan kerja terhadap penyelenggaraan perkantoran.

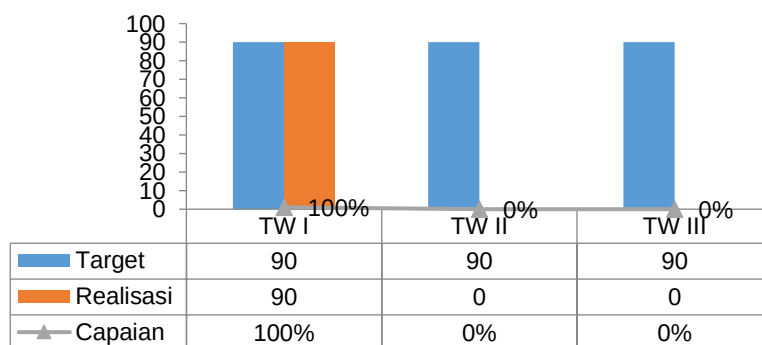
Untuk menghitung Indikator Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat digunakan rumus sebagai berikut:

| NO       | URAIAN                                                     |                                            | BOBOT      | NILAI |
|----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------|
| <b>A</b> | <b>Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan</b>     |                                            | <b>25%</b> |       |
|          | 1                                                          | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) | 10%        |       |
|          | 2                                                          | Perjanjian Kinerja                         | 5%         |       |
|          | 3                                                          | pengisian input e-planning                 | 5%         |       |
|          | 4                                                          | pengisian input e-performance              | 5%         |       |
| <b>B</b> | <b>Indeks Profesionalisme ASN</b>                          |                                            | <b>25%</b> |       |
|          | 1                                                          | Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)   | 6%         |       |
|          | 2                                                          | Kompetensi                                 | 10%        |       |
|          | 3                                                          | Kinerja                                    | 8%         |       |
|          | 4                                                          | Disiplin                                   | 1%         |       |
| <b>C</b> | <b>Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja</b>            |                                            | <b>25%</b> |       |
| <b>D</b> | <b>Indeks Kepuasan Pegawai Penyelenggaraan Perkantoran</b> |                                            | <b>25%</b> |       |

#### a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Triwulan I terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat triwulan I tahun 2025 sebesar 90 Nilai jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja tahun 2025 sebesar 90 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat.

Grafik I.1 Capaian IKK Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat





Pada triwulan I, target kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat ditetapkan nilai 90. Realisasi kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat pada triwulan I dengan nilai 90. Sehingga capaian kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat sebesar 100%.

### **a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan**

- **Dasar Hukum**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat. Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara mempunyai 4 (empat) unit kerja Eselon IV, sebagai berikut :

1. Subbagian Tata Usaha;
2. Seksi Sarana Angkutan Jalan, Sungai Danau dan Penyeberangan;
3. Seksi Prasarana Angkutan Jalan, Sungai Danau dan Penyeberangan;
4. Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai Danau Penyeberangan dan Pengawasan,

- **Kronologi Target**

Target Indikator kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara kinerja tahun 2025 dengan target kinerja 90 dengan satuan nilai.

- **Faktor Keberhasilan**

a. Aspek perencanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Adapun keberhasilan dalam aspek perencanaan sebagai berikut:

1. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) berjenjang disusun sesuai dengan waktu yang ditentukan;

2. Penginputan data capaian kinerja pada aplikasi e-performance disampaikan tepat waktu setiap tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 5 (lima) bulan berjalan;
3. Data Dukung dalam penyusunan dokumen SAKIP dikumpulkan oleh tim tepat waktu.

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun kegagalan dalam aspek perencanaan sebagai berikut:

1. Data dukung capaian kinerja dari TIM SAKIP setiap seksi sering mengalami keterlambatan;
2. Jaringan internet kadang menjadi kendala pada saat Penginputan data capaian kinerja pada aplikasi e-performance dan E-sakip Reviu;
3. Capaian indikator kinerja kegiatan belum mencapai realisasi sesuai target yang ditetapkan pada bulan berjalan.

b. Aspek kepegawaian

Aspek kepegawaian dinilai melalui indeks profesionalisme ASN yang terdiri dari sub aspek kualifikasi (Pendidikan formal terakhir), kompetensi, kinerja, dan disiplin. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Dalam pelaksanaan aspek kegiatan terdapat keberhasilan dan kegagalan sebagai berikut:

- **Faktor Keberhasilan**

Adapun keberhasilan dalam aspek kepegawaian sebagai berikut:

1. Terdapat kualifikasi pendidikan pegawai dengan tingkat S2, S1 dan D3;
2. Pegawai memiliki kinerja yang baik;
3. Pegawai dengan tingkat disiplin yang baik;

- **Faktor Kegagalan**

Adapun kegagalan dalam aspek kepegawaian sebagai berikut:

1. Tidak terdapat pengembangan peningkatan SDM pegawai dikarenakan kekurangan anggaran;
2. Kinerja pegawai yang menurun;

3. Tidak berjalannya kontrol disiplin pegawai oleh TIM Unit kepatuhan Internal.

c. Aspek keuangan

Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Penggunaan anggaran membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan atas beban APBN.

Adapun keberhasilan dalam aspek keuangan sebagai berikut:

1. Mampu mencapai realisasi sesuai dengan rencana penarikan dana per bulan;
2. Mampu mencapai tingkat penyerapan daya serap yang telah di targetkan;
3. Semua rencana pencairan pekerjaan fisik maupun non fisik berjalan sesuai dengan perencanaan.

Adapun kegagalan dalam aspek keuangan sebagai berikut:

1. realisasi tidak sesuai dengan rencana penarikan dana per bulan dikarenakan rencana kerja tidak berjalan sesuai;
2. pencairan dana termin kegiatan fisik tidak sesuai dengan jadwal pencairan karena mengalami adendum;
3. Surat perintah membayar di tolak oleh KPPN dikarenakan data dukung pengajuan tidak lengkap.
4. Terjadinya pemblokiran anggaran pada POK mengakibatkan rendahnya daya serap.

d. Aspek penyelenggaraan perkantoran

aspek penyelenggaraan perkantoran dinilai berdasarkan hasil survei indeks kepuasan pegawai Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara terhadap penyelenggaraan perkantoran.

- **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Triwulan I Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu dengan nilai sebesar 90 dengan perhitungan sebagai berikut:

| NO       | URAIAN                                                     |                                                   | BOBOT      | NILAI      |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>A</b> | <b>Ketepatan waktu pelaksanaan dokumen perencanaan</b>     |                                                   | <b>25%</b> | <b>25%</b> |
|          | 1                                                          | <i>Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)</i> | 10%        | 10%        |
|          | 2                                                          | <i>Perjanjian Kinerja</i>                         | 5%         | 5%         |
|          | 3                                                          | <i>pengisian input e-planning</i>                 | 5%         | 5%         |
|          | 4                                                          | <i>pengisian input e-performance</i>              | 5%         | 5%         |
| <b>B</b> | <b>Indeks Profesionalisme ASN</b>                          |                                                   | <b>25%</b> | <b>25%</b> |
|          | 1                                                          | <i>Kualifikasi (Pendidikan Formal Terakhir)</i>   | 6%         | 6%         |
|          | 2                                                          | <i>Kompetensi</i>                                 | 10%        | 10%        |
|          | 3                                                          | <i>Kinerja</i>                                    | 8%         | 8%         |
|          | 4                                                          | <i>Disiplin</i>                                   | 1%         | 1%         |
| <b>C</b> | <b>Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja</b>            |                                                   | <b>25%</b> | <b>25%</b> |
| <b>D</b> | <b>Indeks Kepuasan Pegawai Penyelenggaraan Perkantoran</b> |                                                   | <b>25%</b> | <b>25%</b> |

Berdasarkan realisasi kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat Triwulan I Tahun 2025 sebesar 90 Nilai dengan target sebesar 90 Nilai.

- **Capaian Kinerja**

maka perhitungan capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat sebesar 100% dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{90}{90} \times 100 = 100\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun anggaran 4640 - Penunjang Teknis Transportasi Darat dengan nomenklatur 923 – Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat pagu anggaran senilai Rp. 5.683.025.000 terkait Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat Triwulan I Tahun 2025 dengan Realisasi anggaran hingga Triwulan I senilai Rp 0 maka capaian sebesar 0%

#### **a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Menginput capaian kinerja kegiatan pada aplikasi e-performance tepat waktu sesuai waktu yang telah ditentukan;
2. Menyusun Dokumen SAKIP sesuai dengan waktu yang ditentukan;
3. Melaksanakan pengembangan kompetensi pegawai dan memberikan apresiasi kepada pegawai Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara yang berprestasi agar meningkatkan motivasi bagi pegawai dalam melaksanakan tugas;
4. melaksanakan kegiatan penyelenggaraan perkantoran sesuai dengan anggaran yang tersedia agar realisasi anggaran untuk penyerapan anggaran dapat berjalan sesuai target;
5. Rutin melakukan evaluasi secara internal terkait kinerja yang sedang berlangsung guna meminimalisir tidak tercapainya target kinerja tahun berjalan.

## **Sasaran Kegiatan 6 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 6 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu: IKK 1 Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat

| SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM |                                                                     |               |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>SK5</b>                                  | <b>Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat</b>              |               |
| <b>IKK 5.1</b>                              | <b>Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat</b> | <b>satuan</b> |
|                                             | <b>Target/Realisasi/Capaian</b>                                     | <b>Tw 1</b>   |
|                                             | Target                                                              | 85            |
|                                             | Realisasi                                                           | 85            |
|                                             | <b>Capaian</b>                                                      | <b>100%</b>   |

### **IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat**

#### **a.1. Definisi Indikator Kinerja**

Penyelenggaraan perkantoran ditujukan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggara perkantoran dalam kegiatan penyelenggaraan perkantoran sehingga dapat berdayaguna, berhasil guna, dan dapat memberikan pelayanan terhadap Pimpinan serta setiap pegawai pada unit kerja sesuai dengan kebutuhan dan standar untuk mendukung kinerja sebagai bentuk pelayanan prima.

1. Pengukuran kualitas penyelenggaraan perkantoran dibatasi di lingkup unsur K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
2. Indikator Kinerja diukur melalui nilai kuesioner yang dikonversi ke dalam bentuk persentase (%) dan tingkat ketersediaan fasilitas perkantoran.
3. Bobot:
  - Kuesioner tingkat kepuasan bagi pejabat tingkat Eselon III, dan Eselon IV (25%);
  - Kuesioner tingkat kepuasan bagi Staf (25%); dan
  - Tingkat Ketersediaan fasilitas perkantoran (50%).

| NO | URAIAN                                         |                                                         | BOBOT | NILAI |
|----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------|-------|
| A  | Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon II, III dan IV |                                                         | 25%   |       |
|    | 1                                              | Tingkat kepuasan Pejabat Eselon III                     | 15    |       |
|    | 2                                              | Rata-rata tingkat kepuasan Pejabat Eselon IV            | 10    |       |
| B  | Tingkat Kepuasan Staf                          |                                                         | 25%   |       |
| C  | Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran     |                                                         | 50%   |       |
|    | 1                                              | Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi (nilai x) | 20    |       |
|    | 2                                              | Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop (nilai y)      | 15    |       |
|    | 3                                              | Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet (nilai z)       | 15    |       |

### Cara Perhitungan:

A. Tingkat Kepuasan Pejabat Eselon III dan IV diukur melalui kuesioner;

B. Tingkat Kepuasan Staf diukur melalui kuissoner;

C. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Perkantoran:

1. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi

$$x = \frac{\text{Jumlah Kursi dan Meja di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf)}} \times 100\%$$

2. Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop

$$y = \frac{\text{Jumlah PC atau Laptop di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf) di Kantor}^*} \times 100\%$$

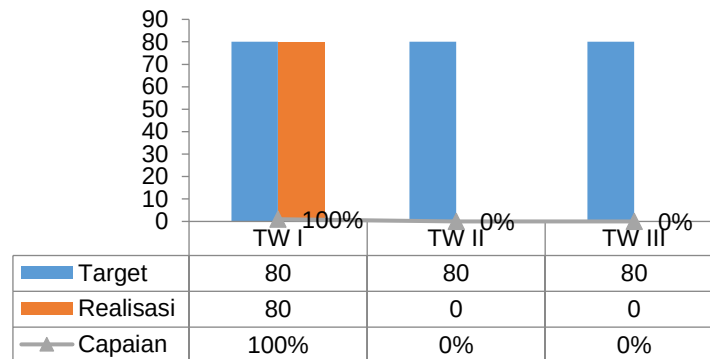
3. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet

$$z = \frac{\text{Rata – rata kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}^{**}}{\text{Standar Kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}^{***}} \times 100\%$$

### a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Triwulan I terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Realisasi kinerja Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat triwulan I tahun 2025 dengan nilai sebesar 85 jika dibandingkan dengan target perjanjian kinerja 2025 sebesar 85 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKK Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat.

Grafik VI.1 Capaian IKK Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat TW I



Pada triwulan I, target tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat ditetapkan nilai 80. Realisasi tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat pada triwulan I dengan nilai 80. Sehingga capaian tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat sebesar 100%

### a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat. Berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029 Kementerian Perhubungan, menargetkan sasaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel
2. Birokrasi yang Kapabel
3. Pelayanan Publik yang Prima



- **Kronologi Target**

Tahun 2025, Indikator Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terhadap Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel memiliki target 80 yang diperoleh dari capaian terhadap PK di Tahun sebelumnya dengan berdasarkan arahan pimpinan.

- **Faktor Keberhasilan .**

Adapun keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut.

- a. Terwujudnya kenyamanan sarana dan prasarana dalam bekerja dengan melengkapi perlengkapan dan peralatan yang memadai;
- b. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan unit kerja memperoleh informasi;
- c. Terwujudnya pelayanan sumber daya manusia dan pelayanan administrasi kepegawaian yang memadai.

- **Faktor Kegagalan.**

Adapun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut.

- a. Kurangnya fasilitas internet yang tidak memadai menurunkan penggunaan teknologi informasi oleh unit kerja;
- b. Tidak terwujudnya kenyamanan dalam melaksanakan kegiatan perkantoran disebabkan tidak memadainya fasilitas sarana dan prasarana;
- c. Pelayanan administrasi kepegawaian yang kurang memadai

- **Realisasi Kinerja**

Realisasi Indikator kinerja kegiatan Indikator Kinerja Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat dilakukan dengan melaksanakan survei kepuasan pada pegawai Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara dengan hasil sebagai berikut.

- a. Ketanggapan pegawai terhadap kesulitan unit kerja dalam menyusun perencanaan program dan anggaran dengan nilai 100%;
- b. Kemudahan dalam mengakses hasil dari penyusunan perencanaan program dan anggaran dengan nilai 100%;

- c. Kemudahan dalam memperoleh informasi tentang peraturan dengan nilai 95%;
- d. Keramahan pegawai dalam melaksanakan pelayanan dengan nilai 100%.

Daftar Jumlah Fasilitas

| No | Nama Fasilitas   | Jumlah   |
|----|------------------|----------|
| 1  | Fasilitas Meja   | 60 Unit  |
| 2  | Fasilitas Kursi  | 116 Unit |
| 4  | Fasilitas PC     | 18 Unit  |
| 5  | Fasilitas Laptop | 45 Unit  |

Untuk menghitung Indikator Kinerja Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat triwulan I digunakan rumus sebagai berikut:

Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja dan Kursi

$$x = \frac{\text{Jumlah Kursi dan Meja di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf)}} \times 100\%$$

Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC/Laptop

$$y = \frac{\text{Jumlah PC atau Laptop di Kantor}}{\text{Jumlah Pegawai (Pejabat dan Staf) di Kantor}} \times 100\%$$

Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet

$$z = \frac{\text{Rata – rata kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}^{**}}{\text{Standar Kecepatan Internet (Unduh) di Kantor}^{***}} \times 100\%$$

Sehingga capaian Indikator Kinerja Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat adalah

1. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Meja

$$x = \frac{60}{97} \times 100\% = 61,86\%$$

$$\text{Sehingga Capaian} = \frac{0,61}{100} \times 100 = 61\%$$

2. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Kursi

$$x = \frac{116}{97} x = 1,19$$

$$\text{Sehingga Capaian} = \frac{119}{100} \times 100 = 119\%$$

3. Tingkat Ketersediaan Fasilitas PC

$$y = \frac{18}{97} = 0,18$$

$$y = \frac{0,18}{100} \times 100\% = 18\%$$

4. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Laptop

$$y = \frac{45}{97} = 0,45$$

$$y = \frac{0,45}{100} \times 100\% = 45\%$$

2. Tingkat Ketersediaan Fasilitas Internet

$$z = \frac{4,35 \text{ Mbps}^{**}}{11 \text{ Mbps}^{****}} \times 100\% = 90\%$$

- **Realisasi anggaran**

Adapun anggaran 4670 - Pengelolaan Organisasi dan SDM Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat terkait indikator kinerja penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat dengan pagu anggaran senilai Rp. 30.381.051.000 Realisasi anggaran hingga Triwulan I senilai Rp 6.135.821.611 maka capaian sebesar 20%.

#### **a.4 Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang**

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu

1. Melakukan perawatan dan pemeliharaan fasilitas meja dan kursi
2. Menambah fasilitas meja dan kursi sesuai jumlah pegawai
3. Meningkatkan fasilitas internet kantor untuk meningkatkan kinerja pegawai.
4. Mengoptimalkan sistem pengendalian dan belum terdapat evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan BPTD ;

### 4.3 Alokasi Anggaran Tahun 2025

#### 4.3.1 Pagu Anggaran

Pagu Awal DIPA TA. 2025 sebesar **Rp. 149.931.648.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

a.1 Rincian per Sumber Dana:

|              |            |                        |             |
|--------------|------------|------------------------|-------------|
| <b>RM</b>    | Rp.        | 126.310.251.000        | 84%         |
| <b>PNBP</b>  | Rp.        | 23.621.397.000         | 16%         |
| <b>SBSN</b>  | Rp.        | 0                      | 0           |
| <b>Total</b> | <b>Rp.</b> | <b>149.931.648.000</b> | <b>100%</b> |

a.2 Rincian per Jenis Belanja:

|                        |            |                        |             |
|------------------------|------------|------------------------|-------------|
| <b>Belanja Pegawai</b> | Rp.        | 22.020.735.000         | 15%         |
| <b>Belanja Barang</b>  | Rp.        | 62.302.754.000         | 42%         |
| <b>Belanja Modal</b>   | Rp.        | 65.608.159.000         | 43%         |
| <b>Total</b>           | <b>Rp.</b> | <b>149.931.648.000</b> | <b>100%</b> |

a.3 Penambahan dan pergeseran anggaran tersebut sesuai Surat Pengesahan Anggaran sebagai berikut:

- Surat Kementerian Keuangan tanggal 2 Desember 2024 Nomor SP DIPA - 022.03.2.403866/2025 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara TA. 2025 (DPA Awal);
- Surat Kementerian Keuangan tanggal 14 Januari 2025 Nomor SP DIPA - 022.03.2.403866/2025 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara TA. 2025 (DPA Revisi I);
- Surat Kementerian Keuangan tanggal 22 februari 2025 Nomor SP DIPA - 022.03.2.403866/2025 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara TA. 2025 (DPA Revisi II);

#### 4.3.2 Refocussing Anggaran Tahun 2025

Berdasarkan Surat Kementerian Keuangan tanggal 2 Desember 2024 Nomor SP DIPA -022.03.2.403866/2025 perihal Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara TA. 2025 (DPA Awal); sehingga perlu dilakukan penyesuaian anggaran pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara dengan rincian sebagai berikut.

##### a.1 Rincian Revisi Per Sumber Dana

|           | SUMBER DANA     |                |      | JUMLAH          |
|-----------|-----------------|----------------|------|-----------------|
|           | RM              | PNBP           | SBSN |                 |
| PAGU AWAL | 126.310.251.000 | 23.621.397.000 |      | 149.931.648.000 |

##### a.2 Rincian Revisi per Jenis Belanja

|           | JENIS BELANJA  |                |                | JUMLAH          |
|-----------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|           | B.PEGAWAI      | B.BARANG       | B.MODAL        |                 |
| PAGU AWAL | 22.020.735.000 | 62.302.754.000 | 65.608.159.000 | 149.931.648.000 |

##### a.3 Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja :

|                 | PAGU AWAL       | PERUBAHAN | PAGU AKHIR<br>PER TRIWULAN I |
|-----------------|-----------------|-----------|------------------------------|
| Belanja Pegawai | 22.020.735.000  | 0         | 22.020.735.000               |
| Belanja Barang  | 62.302.754.000  | 0         | 62.302.754.000               |
| · RM            | 62.295.354.800  | 0         | 62.295.354.800               |
| · PNBP          | 739.920.000     | 0         | 739.920.000                  |
| Belanja Modal   | 65.608.159.000  | 0         | 65.608.159.000               |
| · RM            | 42.636.682.000  | 0         | 42.636.682.000               |
| · PNBP          | 22.971.477.000  |           | 22.971.477.000               |
| · SBSN          | 0               | 0         | 0                            |
| <b>TOTAL</b>    | 149.931.648.000 | 0         | 149.931.648.000              |

#### a.4 Rincian Realokasi Per Sasaran Kegiatan Tahun 2025

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi):

| NOMENKLATUR PROGRAM                                                 | PAGU AWAL              | PERUBAHAN | PAGU AKHIR PER TRIWULAN I |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|---------------------------|
| BPTD Kelas II Maluku Utara                                          | 149.931.648.000        | -         | 149.931.648.000           |
| <b>Program Infrastruktur Konektivitas</b>                           | <b>119.550.597.000</b> | <b>-</b>  | <b>119.550.597.000</b>    |
| Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat                       | 59.402.219.000         | 0         | 59.402.219.000            |
| Pelayanan Transportasi Darat                                        | 8.485.595.000          | 0         | 8.485.595.000             |
| Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat                         | 45.979.758.000         | 0         | 45.979.758.000            |
| Penunjang Teknis Transportasi Darat                                 | 5.683.025.000          | 0         | 5.683.025.000             |
| <b>Program Dukungan Manajemen</b>                                   | <b>30.381.051.000</b>  | <b>0</b>  | <b>30.381.051.000</b>     |
| Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat                   | 8.360.316.000          | 0         | 8.360.316.000             |
| Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat | 22.020.735.000         | 0         | 22.020.735.000            |

Sumber : keuangan BPTD Maluku Utara

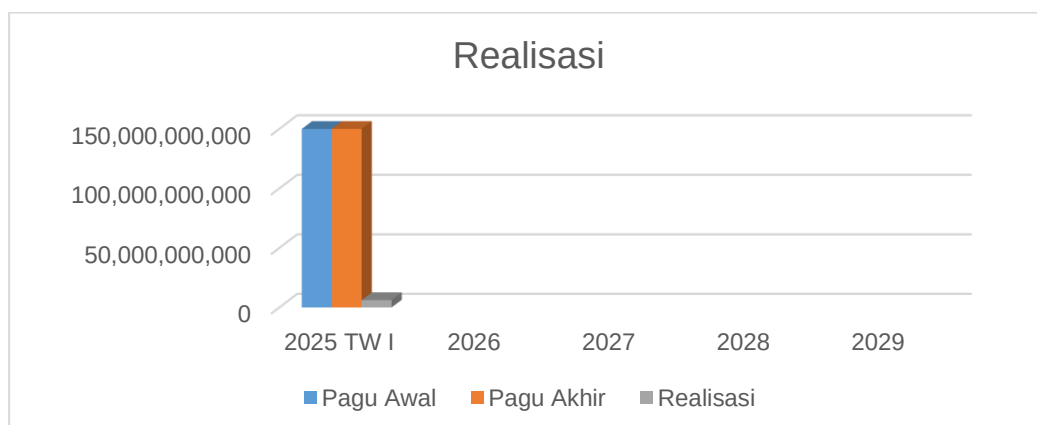
#### 4.3.3 Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2025 - 2029

Tabel Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025 – Tahun 2029

| No | Tahun     | Pagu Awal       | Pagu Akhir      | Realisasi     |       |
|----|-----------|-----------------|-----------------|---------------|-------|
|    |           | Rp.             | Rp.             | Rp.           | %     |
| 1  | 2025 TW I | 149.931.648.000 | 149.931.648.000 | 6.160.000.164 | 4,11% |

Sumber : keuangan BPTD Maluku Utara

Grafik Perbandingan Pagu Akhir dan Realisasi Anggaran  
Tahun 2025 – Tahun 2029 Triwulan I



#### 4.4 Realisasi Anggaran

- a. Realisasi penyerapan anggaran Triwulan I Tahun 2025 untuk semua jenis belanja sebesar Rp. 6.160.000.164 atau mencapai 4.11% dari total pagu sebesar Rp. 149.931.648.000.

##### 4.4.1 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025

| NO           | JENIS BELANJA   | PAGU ALOKASI            | REALISASI TW I       |              |
|--------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------------|
|              |                 | Rp.                     | Rp.                  | %            |
| 1            | Belanja Pegawai | 22.020.735.000          | 3.791.981.184        | 17.22%       |
| 2            | Belanja Barang  | 62.302.754.000          | 2.368.018.980        | 3.80%        |
| 3            | Belanja Modal   | 65.608.159.000          | 0                    | 0.00%        |
| <b>TOTAL</b> |                 | <b>149.931.648.000.</b> | <b>6.160.000.164</b> | <b>4,11%</b> |

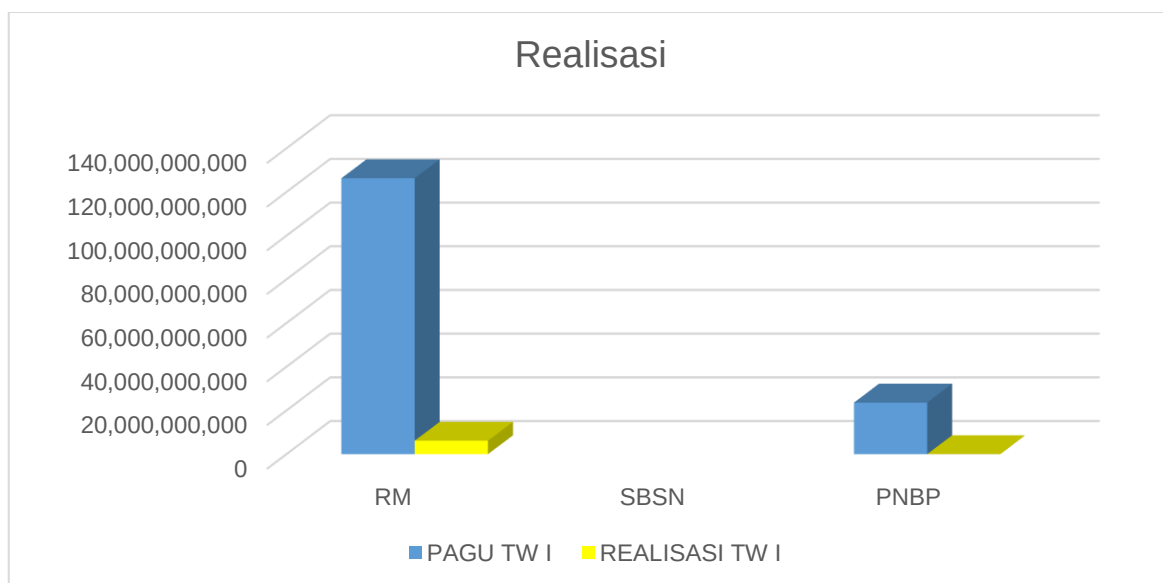
Sumber : keuangan BPTD Maluku Utara

##### 4.4.2 Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025

| NO           | SUMBER DANA  | PAGU ALOKASI            | REALISASI TW I       |              |
|--------------|--------------|-------------------------|----------------------|--------------|
|              |              | Rp.                     | Rp.                  | %            |
| 1            | Rupiah Murni | 126.310.251.000         | 6.160.000.164        | 4,87%        |
| 2            | PNBP         | 23.621.397.000          | 0                    | 0.00%        |
| 3            | SBSN         | 0                       | 0                    | 0            |
| <b>TOTAL</b> |              | <b>149.931.648.000.</b> | <b>6.160.000.164</b> | <b>4.11%</b> |

Sumber : keuangan BPTD Maluku Utara

#### Grafik Realisasi Penyerapan Pagu Anggaran Triwulan I Tahun 2025







#### 1.4.3 Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2025

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi):

Tabel Kegiatan Program yang ada dalam DIPA

| KODE      | NOMENKLATUR PROGRAM                                                 | PAGU AWAL        | PAGU PER TRIWULAN I | TRIWULAN I     |       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|-------|
|           |                                                                     |                  |                     | REALIASI       | %     |
| 022.03    | Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Malut                   | 149.931.648.000. | 149.931.648.000.    | 6.160.000.164  | 4.11% |
| 022.03.GA | Program Infrastruktur Konektivitas                                  | 119.550.597.000  | 56.394.269.000      | 26.119.900.600 | 21%   |
| 4637      | Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat                       | 59.402.219.000   | 49.809.319.000      | 25.296.251.600 | 42%   |
| 4638      | Pelayanan Transportasi Darat                                        | 8.485.595.000    | 1.688.600.000       | 685.500.000    | 8%    |
| 4639      | Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat                         | 45.979.758.000   | 4.619.050.000       | 138.149.000    | 0.3%  |
| 4640      | Penunjang Teknis Transportasi Darat                                 | 5.683.025.000    | 277.300.000         | 0              | 0%    |
| 022.03.WA | Program Dukungan Manajemen                                          | 30.381.051.000   | 27.034.992.000      | 5.360.666.471  | 17%   |
| 4670      | Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat                   | 8.360.316.000    | 5.014.257.000       | 1.053.663.000  | 12%   |
| 4670      | Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat | 22.020.735.000   | 22.020.735.000      | 4.307.003.471  | 19%   |

#### 1.4.4 Analisis Atas Efisiensi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025

Berikut merupakan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan sasaran kegiatan per Triwulan I Tahun 2025, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan rincian sebagai berikut:

Tabel Efisiensi Anggaran

| N<br>o          | Sasaran Kegiatan |                                                                                     | Triwulan I                            |                      |                         |
|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|                 |                  |                                                                                     | Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran (%) | Capaian Keuangan (%) | Efisiensi (posisi TW I) |
| 1               | SK1              | Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi | 48%                                   | 21%                  | 27%                     |
| 2               | SK2              | Meningkatnya pelayanan transportasi darat                                           | 100%                                  | 8%                   | 92%                     |
| 3               | SK3              | Meningkatnya keselamatan transportasi darat                                         | 25%                                   | 0.3%                 | 24,7%                   |
| 4               | SK4              | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat            | 100%                                  | 0%                   | 100%                    |
| 5               | SK5              | Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel                           | 100%                                  | 17%                  | 83%                     |
| Total Rata Rata |                  |                                                                                     | 75%                                   | 9,26%                | 66%                     |

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 75%, dengan realisasi anggaran sebesar 9,26% menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 66%.

### **1.5 Hambatan dan Kendala**

Dalam Pelaksanaan Kegiatan terdapat beberapa hambatan/kendala sehingga menyebabkan masih rendahnya realisasi daya serap anggaran pada Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara Sebagai Berikut.

1. Pada Tahun 2025 terdapat beberapa Mata anggaran yang di blokir pada POK BPTD Maluku Utara Tahun 2025 menyebabkan tidak dapat berjalannya beberapa kegiatan;
2. Terlambatnya permintaan pencairan dana dari pihak ketiga untuk pekerjaan belanja barang dan belanja modal;
3. Terdapat beberapa pekerjaan fisik yang tidak terlaksana sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.
4. Jumlah pencairan anggaran tidak sesuai dengan RPD yang telah direncanakan.



PENDAHULUAN

AKUNTABILITAS  
KINERJA

PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I

BAB II

BAB III



## **BAB 3**

# **PENUTUP**

### **3.1 Ringkasan Capaian**

Dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara serta Pengelolaan Sumber Daya dan Pelaksanaan Kebijakan dan Program. Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulan satu ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

---



1) Sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kegiatan untuk Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dari keseluruhan kegiatan yang telah terdapat 10 indikator kinerja BPTD Kelas II Maluku Utara pada Triwulan I tahun 2025. Terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% ( $IKP \geq 100\%$ ) dan 5 (lima) Indikator Kinerja Program kurang dari 100% ( $0\% \leq IKP < 100\%$ ). 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan yang capaiannya telah/lebih dari target adalah sebagai berikut:

1. Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi, dengan target per triwulan I sebesar 20 lokasi dengan realisasi 20 lokasi maka capaian 100%;
2. Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di Pelabuhan SDP;
3. Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Alur Pelayaran, dengan target per triwulan I sebesar 4 Unit dengan realisasi 4 Unit maka capaian 100%;
4. Kualitas Dukungan Teknis Transportasi Darat dengan target Nilai sebesar 90 dengan realisasi sebesar 90 maka capaian triwulan I sebesar 100%;
5. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat dengan target Nilai sebesar 80 dengan realisasi sebesar 80 maka capaian triwulan I sebesar 100%.

Sedangkan terdapat 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan belum mencapai realisasi capaian. Indikator Kinerja Kegiatan belum/kurang memenuhi target yang diharapkan yaitu:

1. Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi keselamatan jalan,;
2. Persentase Standarisasi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
3. Persentase Pelaksanaan Keperintisan Angkutan Jalan nasional;
4. Persentase Pelaksanaan Pelayanan Keperintisan Angkutan Penyeberangan;
5. Persentase Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Fasilitas Keselamatan Jalan yang telah terpasang terhadap Kondisi Ideal;

2) Untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun 2025, BPTD Kelas II Maluku Utara akan melakukan proses yang lebih selektif terhadap kinerja untuk peningkatan pencapaian kinerja sesuai dengan target kinerja pada tahun 2025.





| SASARAN KEGIATAN |                                                                                     | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                   | SATUAN | TARGET | TRIWULAN I |          |          | EVALUASI       | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PENANGGU<br>NG JAWAB |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|----------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                  |                                                                                     |                                                                              |        |        | <i>T</i>   | <i>R</i> | <i>C</i> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |
| SK1              | Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi | IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional          | %      | 92     | 92         | 14       | 14%      | Tidak Tercapai | 1. Melakukan monitoring dan evaluasi per triwulan terhadap trayek dan pelaksanaan operasional angkutan keperintisan angkutan jalan<br>2. Penguatan koordinasi terhadap pihak terkait, agar pelaksanaan angkutan jalan berjalan dengan baik dan tujuan penyelenggaraan angkutan dapat tercapai;<br>3. Melaksanakan Rampcheck secara berkala atas angkutan jalan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan | Seksi Sarana         |
|                  |                                                                                     | IKK 1.5 Presentasi pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan | %      | 100    | 100        | 41       | 41%      | Tidak Tercapai | 1. melaksanakan pengawasan operasional secara berkala pada angkutan penyeberangan perintis dalam melayani                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seksi Lalu Lintas    |

| SASARAN KEGIATAN |                                                   | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                        | SATUAN | TARGET | TRIWULAN I |          |          | EVALUASI       | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                 | PENANGGU<br>NG JAWAB |
|------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|----------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                  |                                                   |                                                                                   |        |        | <i>T</i>   | <i>R</i> | <i>C</i> |                |                                                                                                                                                                                               |                      |
|                  |                                                   |                                                                                   |        |        |            |          |          |                | masyarakat pada lintasan perintis<br>2. melaksanakan pengawasan terhadap jadwal oerasional kapal<br>3. berkoordinasi dengan operator kapal dalam melaksanakan pelayanan                       |                      |
|                  |                                                   | IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi                                      | Lokasi | 20     | 20         | 20       | 100%     | Tercapai       | Meningkatkan pelayanan pada pelabuhan penyeberangan                                                                                                                                           | Seksi Prasarana      |
| SK 2             | Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat | IKK 2.3 Presentasi pelaksanaan standar pelayanan minimum (SPM) di pelabuhan SDP   | %      | 100    | 100%       | 100%     | 100%     | Tercapai       | Melaporkan dan berkoordinasi hasil pemeriksaan SPM kepada operator pelabuhan penyeberangan untuk ditindaklanjuti kekurangan dan meningkatkan fasilitas pelayanan pada pelabuhan penyeberangan | Seksi Prasarana      |
| SK 4             | Meningkatnya keselamatan transportasi darat       | IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal | %      | 100    | 100%       | 0        | 0%       | Tidak Tercapai | Dilaksanakan setelah anggaran di buka blokir pada POK                                                                                                                                         | Seksi Lalu Lintas    |

| SASARAN KEGIATAN |                                                                          | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                           | SATUAN | TARGET | TRIWULAN I |          |          | EVALUASI       | TINDAK LANJUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PENANGGUNG JAWAB  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------|----------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  |                                                                          |                                                                                      |        |        | <i>T</i>   | <i>R</i> | <i>C</i> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|                  |                                                                          | IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan | Orang  | 150    | 100        | 0        | 0        | Tidak Tercapai | Dilaksanakan setelah anggaran di buka blokir pada POK                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seksi Sarana      |
|                  |                                                                          | IKK 7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor                  | %      | 100    | 100        | 0        | 0%       | Tidak Tercapai | Dilaksanakan setelah anggaran di buka blokir pada POK                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seksi Sarana      |
|                  |                                                                          | IKK 7b Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP                  | Lokasi | 4      | 4          | 4        | 100%     | Tercapai       | Melaksanakan Monitoring SBNP secara Berkala                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seksi Lalu Lintas |
| SK5              | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat | IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat                  | Nilai  | 90     | 90         | 90       | 100%     | Tercapai       | Membuat timeline target penyelenggaraan dukungan teknis BPTD .                                                                                                                                                                                                                                                         | Tata Usaha        |
| SK1              | Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel                | IKK 1. Tingkat penyelenggaraan perkantoran<br>Ditjen Perhubungan Darat               | Nilai  | 85     | 85         | 85       | 100%     | Tercapai       | 1. Melakukan Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan penyelenggaraan perkantoran melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPTD<br>2. Melaksanakan tindak lanjut perbaikan atas hasil Pengawasan dan Pemantauan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Ditjen Hubdat | Tata Usaha        |









KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA



PENDAHULUAN

AKUNTABILITAS  
KINERJA

PENUTUP

LAMPIRAN

BAB I

BAB II

BAB III





# RENCANA KINERJA TAHUNAN

# 20 25

**Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara**  
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat



**RENCANA KINERJA TAHUN 2025**  
**UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT**  
**KELAS II MALUKU UTARA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**  
**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

| SASARAN KEGIATAN |                                                                                     | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                           | SATUAN | TARGET |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| (1)              | (2)                                                                                 | (3)                                                                                  | (4)    | (5)    |
| SK1              | Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi | IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan                           | %      | 100    |
|                  |                                                                                     | IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan         | %      | 100    |
|                  |                                                                                     | IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi                                         | Lokasi | 20     |
| SK2              | Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat                                   | IKK 2.3 Persentase pelaksanaan standar pelayanan minimum (SPM) di pelabuhan SDP      | %      | 70     |
| SK4              | Meningkatnya keselamatan transportasi darat                                         | IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal    | %      | 100    |
|                  |                                                                                     | IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan | Orang  | 1000   |
|                  |                                                                                     | IKK 7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor                  | %      | 50     |
|                  |                                                                                     | IKK 7b Jumlah ketersediaan Fasilitas keselamatan alur Pelayaran SDP                  | Lokasi | 6      |
| SK5              | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat            | IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat                  | Nilai  | 100    |



| SASARAN KEGIATAN |                                                           | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                          | SATUAN | TARGET |
|------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| (1)              | (2)                                                       | (3)                                                                 | (4)    | (5)    |
| SK1              | Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel | IKK 1. Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat | Nilai  | 85,5   |

Ternate, 30 Desember 2024

Pihak Pertama

Joko Kusnanto, ST, M.Sc

NIP. 197811152006041001



Kementerian Perhubungan RI  
**Direktorat Jenderal Perhubungan Darat**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Joko Kusnanto, ST, M.Sc

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ahmad Yani, A.T.D., M.T

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ternate, 7 Januari 2025

Pihak Pertama

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat  
Kelas II Maluku Utara,

JOKO KUSNANTO, ST, M.Sc  
NIP. 19781115 200604 1 001

Pihak Kedua

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat,

AHMAD YANI, A.T.D., M.T  
NIP. 19650930 199003 1 003



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II MALUKU UTARA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**  
**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

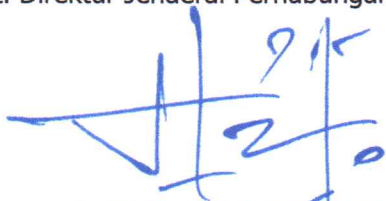
| NO. | SASARAN KEGIATAN                                                                    | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                           | SATUAN | TARGET |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| (1) | (2)                                                                                 | (3)                                                                                  | (4)    | (5)    |
| SK1 | Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi | IKK 1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan nasional                  | %      | 92     |
|     |                                                                                     | IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan         | %      | 100    |
|     |                                                                                     | IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi                                         | Lokasi | 20     |
| SK2 | Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat                                   | IKK 2.3 Persentase pelaksanaan standar pelayanan minimal (SPM) di pelabuhan SDP      | %      | 100    |
| SK4 | Meningkatnya keselamatan transportasi darat                                         | IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal    | %      | 100    |
|     |                                                                                     | IKK 3.5 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan | Orang  | 150    |
|     |                                                                                     | IKK 7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor                  | %      | 100    |
|     |                                                                                     | IKK 7b Jumlah ketersediaan fasilitas Keselamatan alur pelayaran SDP                  | Lokasi | 4      |
| SK5 | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat            | IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat                  | Nilai  | 90     |
| SK1 | Meningkatnya birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel                           | IKK 1. Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat                  | Nilai  | 85     |

**Kegiatan****Anggaran**

|                                                                       |     |                |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|----------------|
| 1. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat                      | Rp. | 59.402.219.000 |
| 2. Pelayanan Transportasi Darat                                       | Rp. | 8.485.595.000  |
| 3. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat                        | Rp. | 45.979.758.000 |
| 4. Penunjang Teknis Transportasi Darat                                | Rp. | 5.683.025.000  |
| 5. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat                  | Rp. | 8.360.316.000  |
| 6. Pengelolaan Perencanaan Keuangan, BMN, dan Umum Transportasi Darat | Rp. | 22.020.735.000 |

Pihak Kedua

Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Darat,

AHMAD YANI, A.T.D., M.T  
NIP. 19650930 199003 1 003

Ternate, 7 Januari 2025

Pihak Pertama

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat  
Kelas II Maluku Utara,JOKO KUSNANTO, ST, M.Sc  
NIP. 19781115 200604 1 001



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nanang Rahardjo, S.H., MH

Jabatan : Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan

Selanjutnya disebut Pihak pertama.

Nama : Joko Kusnanto, ST, M.Sc

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ternate, 6 Januari 2025

Pihak Pertama

Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai ,  
Danau, Penyeberangan dan Pengawasan

NANANG RAHARDJO, S.H., MH  
NIP. 19700206 200312 1 001

Pihak Kedua

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat  
Kelas II Maluku Utara



JOKO KUSNANTO, ST, M.Sc  
NIP. 19781115 200604 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**SEKSI LALU LINTAS JALAN, SUNGAI, DANAU, PENYEBERANGAN**  
**DAN PENGAWASAN UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT**  
**KELAS II MALUKU UTARA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**  
**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

| SASARAN KEGIATAN |                                                                                     | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                        | SATUAN | TARGET |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| (1)              | (2)                                                                                 | (3)                                                                               | (4)    | (6)    |
| SK1              | Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi | IKK 1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan      | %      | 100    |
| SK4              | Meningkatnya keselamatan transportasi darat                                         | IKK 3.1 Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal | %      | 100    |
|                  |                                                                                     | IKK 7b Jumlah ketersediaan fasilitas Keselamatan alur pelayaran SDP               | Lokasi | 4      |

Pihak Kedua  
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat  
Kelas II Maluku Utara



JOKO KUSNANTO, ST, M.Sc  
NIP. 19781115 200604 1 001

Ternate, 6 Januari 2025  
Pihak Pertama  
Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai ,  
Danau, Penyeberangan dan Pengawasan

  
NANANG RAHARDJO, S.H., MH  
NIP. 19700206 200312 1 001





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Santo Igno Gelu, S.Si.T

Jabatan : Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : Joko Kusnanto, ST, M.Sc

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat  
Kelas II Maluku Utara

  
JOKO KUSNANTO, ST, M.Sc  
NIP. 19781115 200604 1 001

Ternate, 6 Januari 2025  
Pihak Pertama  
Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai,  
Danau dan Penyeberangan

  
SANTO IGNO GELU, S.Si.T.  
NIP. 19830218 200604 1 004



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**SEKSI PRASARANA JALAN, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN**  
**UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT**  
**KELAS II MALUKU UTARA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**  
**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

| SASARAN KEGIATAN |                                                                                     | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                      | SATUAN | TARGET |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| (1)              | (2)                                                                                 | (3)                                                                             | (4)    | (5)    |
| SK1              | Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi | IKK 1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi                                    | Lokasi | 20     |
| SK2              | Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat                                   | IKK 2.3 Persentase pelaksanaan standar pelayanan minimum (SPM) di pelabuhan SDP | %      | 100    |

Pihak Kedua  
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat  
Kelas II Maluku Utara



JOKO KUSNANTO, ST, M.Sc  
NIP. 19781115 200604 1 001

Ternate, 6 Januari 2025  
Pihak Pertama  
Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai ,  
Danau dan Penyeberangan

SANTO IGNO GELU, S.Si.T.  
NIP. 19830218 200604 1 004



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yofie Aditama

Jabatan : Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan

Selanjutnya disebut Pihak pertama.

Nama : Joko Kusnanto, ST, M.Sc

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Temate, 6 Januari 2025

Pihak Pertama

Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan,  
Sungai, Danau dan Penyeberangan

YOFIE ADITAMA

NIP. 19840118 200812 1 002

Pihak Kedua

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat  
Kelas II Maluku Utara



JOKO KUSNANTO, ST, M.Sc

NIP. 19781115 200604 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**SEKSI SARANA DAN ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN**  
**UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT**  
**KELAS II MALUKU UTARA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**  
**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

| SASARAN KEGIATAN |                                                                                     | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                           | SATUAN | TARGET |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| (1)              | (2)                                                                                 | (3)                                                                                  | (4)    | (5)    |
| SK1              | Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan Keterpaduan antarmoda transportasi | IKK.1.1 persentase pelaksanaan keberintisan angkutan jalan nasional                  | %      | 92     |
| SK4              | Meningkatnya keselamatan transportasi darat                                         | IKK 4.5 jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan | Orang  | 150    |
|                  |                                                                                     | IKK 4.6 persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor                 | %      | 100    |

Pihak Kedua  
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat  
Kelas II Maluku Utara

JOKO KUSNANTO, ST, M.Sc  
NIP. 19781115 200604 1 001



Ternate, 6 Januari 2025  
Pihak Pertama  
Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai,  
Danau dan Penyeberangan

YOFIE ADITAMA  
NIP. 19840118 200812 1 002



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hamka Husen, SE., MM

Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha

Selanjutnya disebut Pihak pertama.

Nama : Joko Kusnanto, ST, M.Sc

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Maluku Utara

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ternate, 6 Januari 2025

Pihak Pertama,



JOKO KUSNANTO, ST, M.Sc  
NIP. 19781115 200604 1 001

HAMKA HUSEN, SE, M.M  
NIP. 19810830 200701 1 006



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**SUBBAGIAN TATA USAHA**  
**UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT**  
**KELAS II MALUKU UTARA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**  
**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

| SASARAN KEGIATAN |                                                                          | INDIKATOR KINERJA KEGIATAN                                                                    | SATUAN | TARGET |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| (1)              | (2)                                                                      | (3)                                                                                           | (4)    | (5)    |
| SK5              | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat | IKK 5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat                           | Nilai  | 90     |
| SK1              | Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel                | IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran BPTD Kelas II Maluku Utara Ditjen Perhubungan Darat | Nilai  | 80     |



JOKO KUSNANTO, ST, M.Sc  
NIP. 19781115 200604 1 001

Ternate, 6 Januari 2025  
Pihak Pertama,

HAMKA HUSEN, SE, M.M  
NIP. 19810830 200701 1 006



RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA

UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II MALUKU UTARA

TAHUN 2025

| No. | Sasaran Kegiatan                                                                    | Indikator Kinerja | Satuan                                                                       | Target | Kegiatan | Rencana Pelaksanaan                                                                                                                                           |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          |          | Anggaran           | Penanggung Jawab                                                         |                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     |                                                                                     |                   |                                                                              |        |          | Bulan-1                                                                                                                                                       | Bulan-2 | Bulan-3 | Bulan-4 | Bulan-5 | Bulan-6 | Bulan-7 | Bulan-8 | Bulan-9 | Bulan-10 | Bulan-11 | Bulan-12 |                    |                                                                          |                 |
| (1) | (2)                                                                                 | (3)               | (4)                                                                          | (5)    | (6)      | (7)                                                                                                                                                           | (8)     | (9)     | (10)    | (11)    | (12)    | (13)    | (14)    | (15)    | (16)     | (17)     | (18)     | (19)               | (20)                                                                     |                 |
| SK1 | Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi | IKK1.1            | Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan                           | %      | 92       | Penyelenggaraan Subsidi Operasional Angkutan Jalan Perintis Prioritas Nasional                                                                                | 7,6%    | 7,6%    | 7,6%    | 7,6%    | 7,6%    | 7,6%    | 7,6%    | 7,6%    | 7,6%     | 7,6%     | 7,6%     | Rp. 8.590.557.000  | 1. Seksi Lalu Lintas<br>Seksi Sarana                                     | 2.              |
|     |                                                                                     | IKK 1.5           | Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan         | %      | 100      | Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis Prioritas Nasional                                                                                    | 8,3%    | 8,3%    | 8,3%    | 8,3%    | 8,3%    | 8,3%    | 8,3%    | 8,3%    | 8,3%     | 8,3%     | 8,3%     | Rp. 31.440.116.000 | 1. Seksi Lalu Lintas<br>Seksi Sarana                                     | 2.              |
|     |                                                                                     | IKK1.6            | Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi                                         | Lokasi | 20       | Kegiatan Operasional Pelabuhan SDP                                                                                                                            | 20      | 20      | 20      | 20      | 20      | 20      | 20      | 20      | 20       | 20       | 20       | 20                 | Rp. 3.037.018.000                                                        | Seksi Prasarana |
| SK2 | Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi darat                                   | IKK2.3            | Persentase pelaksanaan standar pelayanan minimum (SPM) di pelabuhan SDP      | %      | 100%     | Monitoring dan Pengawasan Pemenuhan SPM Pelabuhan Penyeberangan                                                                                               |         |         |         | 50%     | 50%     |         |         |         |          |          |          | Rp. 76.800.000     | Seksi Prasarana                                                          |                 |
| SK4 | Meningkatnya keselamatan transportasi darat                                         | IKK3.1            | Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal    | %      | 100      | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional                                                                                                |         |         | 20%     | 30%     | 50%     |         |         |         |          |          |          | Rp. 41.349.665.000 | Seksi Lalu Lintas                                                        |                 |
|     |                                                                                     | IKK3.5            | Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan | Orang  | 150      | Sosialisasi Pekan Keselamatan Jalan                                                                                                                           |         |         |         |         |         |         |         |         |          |          | 150      | Rp. 300.000.000    | Seksi Sarana                                                             |                 |
|     |                                                                                     | IKK7a             | Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor                 | %      | 100      | Pelaksanaan Kalibrasi Alat Uji PKB                                                                                                                            |         |         |         | 50%     | 50%     |         |         |         |          |          |          | Rp. 79.110.000     | Seksi Sarana                                                             |                 |
|     |                                                                                     | IKK7b             | Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP                 | Lokasi | 4        | Monitoring Inventarisasi dan Pemeliharaan SBNP                                                                                                                | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4        | 4        | 4        | 0                  | Seksi Lalu Lintas                                                        |                 |
| SK5 | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat            | IKK5.1            | Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat                  | Nilai  | 90       | Pembangunan Mess Pegawai. 'Pemantauan dan Evaluasi PNBP 'Pelaporan Manajemen Risiko 'Pelaporan Dokumen SAKIP Tingkat Pengelolaan Keuangan IP ASN Maluku Utara | 90      | 90      | 90      | 90      | 90      | 90      | 90      | 90      | 90       | 90       | 90       | Rp. 5.683.025.000  | 1. Tata Usaha<br>Seksi Lalu Lintas<br>3. Seksi Prasarana<br>Seksi Sarana | 2.<br>4.        |
| SK1 | Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel                           | IKK1.             | Tingkat penyelenggaraan perkantoran Ditjen Perhubungan Darat                 | Nilai  | 85       | Ketersediaan Fasilitas Perkantoran BMN Layanan Perkantoran (Pembayaran Gaji Pegawai)                                                                          | 85      | 85      | 85      | 85      | 85      | 85      | 85      | 85      | 85       | 85       | 85       | Rp. 30.381.051.000 | Tata Usaha                                                               |                 |

Maluku, 6 Januari 2024  
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat  
Kelas II Maluku Utara

**BALAI PENGELOLA  
TRANSPORTASI DARAT  
KELAS II MALUKU UTARA**

YUKI KUSNANTO, ST, M.Sc  
NIP. 197811152006041001

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI TRANSPORTASI DARAT KELAS II MALUKU UTARA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BULAN MARET TAHUN 2025

| No | Sasaran Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja Kegiatan                                                     | Satuan | Target | Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja Output                                    | Target Kinerja Output                         | Target Bulan-3 |      |                 |      | Realisasi Bulan-3 |                    | % Capaian Bulan-3 |                  | Evaluasi       | Rencana Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Penanggung Jawab                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------|-----------------|------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    |                                                                                          |                                                                                |        |        |                                                                        |                                                             |                                               | Target Output  |      | Target Anggaran |      | Realisasi Output  | Realisasi Anggaran | Capaian Output    | Capaian Anggaran |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |
|    |                                                                                          |                                                                                |        |        |                                                                        |                                                             |                                               | Vol            | %    | Vol             | %    | Volume            | Volume             | %                 | %                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |
| 1  | 2                                                                                        | 3                                                                              | 4      | 5      | 6                                                                      | 7                                                           | 8                                             | 9              | 10   | 11              | 12   | 13                | 14                 | 15                | 16               | 17             | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19                              |
| 1. | SK.1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi | IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan                      | %      | 100    | Subsidi Operasional Angkutan Perintis Provinsi Maluku Utara            | Jumlah Lintas Angkutan perintis yang dilayani               | Layanan Angkutan Jalan Perintis               | 6624           | 92   | 8,590,557,000   | 100% | 959               | 1,460,925,180      | 14.48%            | 17%              | BELUM TERCAPAI | Akan Melaksanakan Monitoring Evaluasi Operasional pelayanan angkutan jalan di trayek - trayek yang telah ditetapkan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.                                                                                                                                                                                             | - Seksi Lalin<br>- Seksi Sarana |
|    |                                                                                          | IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan    | %      | 100    | Penyelenggaraan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Prioritas Nasional | Jumlah Lintas Angkutan penyeberangan perintis yang dilayani | Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis       | 2278           | 100% | 31,440,116,000  | 100% | 924               | 0                  | 41%               | 0                | BELUM TERCAPAI | Akan melakukan pengawasan angkutan perintis penyeberangan agar melayani lintasan sesuai dengan kontrak dan target dengan benar.                                                                                                                                                                                                                                 | - Seksi Lalin<br>- Seksi Sarana |
|    |                                                                                          | IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi                                    | Lokasi | 20     | Operasional Pelabuhan SDP                                              | Jumlah Pelabuhan SDP dikelola                               | Pengawasan operasional Pelabuhan SDP          | 20             | 100% | 3,037,018,000   | 100% | 20                | 713,500,000        | 100%              | 23%              | TERCAPAI       | Melaksanakan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf pelabuhan penyeberangan;                                                                                                                                                                                                              | Seksi Prasarana                 |
| 2. | SK2 Meningkatnya pelayanan transportasi darat                                            | IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP | %      | 100    | Monitoring dan Pengawasan Pemenuhan SPM Pelabuhan Penyeberangan        | Jumlah pengawasan pemenuhan SPM Pelabuhan Penyeberangan     | Pemantauan dan Evaluasi Tupoksi Ditjen Hubdat | 100%           | 100% | 76,800,000      | 100% | 100%              | 0                  | 100%              | 0%               | TERCAPAI       | 1.Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan;                                                                                                                                                                                                                           | Seksi Prasarana                 |
|    |                                                                                          |                                                                                |        |        |                                                                        |                                                             |                                               |                |      |                 |      |                   |                    |                   |                  |                | 2. Melakukan pengawasan secara periodik terhadap ketepatan jadwal di lapangan;<br><br>3. Melakukan rapat evaluasi efektifitas pengaturan jadwal;<br><br>4. Memberlakukan sanksi yang tegas dan pemberian efek jera atas ketidakpatuhan perusahaan angkutan penyeberangan dlm mematuhi jam pelayanan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |                                 |



|    |                                                    |                                                                                        |     |     |                                                                |                                                    |                                               |      |      |                |      |       |   |      |   |                |                                                                                                                                                                                                        |              |
|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|----------------|------|-------|---|------|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3. | SK4<br>Meningkatnya keselamatan transportasi darat | IKK3.1<br>Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal    | %   | 100 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional | Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan | Perlengkapan Fasilitas Keselamatan Jalan      | 100% | 100% | 41,349,665,000 | 100% | 0.00% | 0 | 0%   | 0 | BELUM TERCAPAI | 1. Menginventaris kebutuhan infrastruktur keselamatan jalan<br>2. Membangun dan memfasilitasi infrastruktur keselamatan jalan<br>3. Melakukan monitoring terhadap fasilitas jalan yang telah terpasang | Seksi Lalin  |
|    |                                                    | IKK3.5<br>Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan | Org | 100 | Pekan Keselamatan Jalan                                        | Jumlah Kegiatan Pekan Keselamatan Jalan            | Pelayanan Keselamatan Transportasi Jalan      | 100  | 100% | 300,000,000    | 100% | 0     | 0 | 0    | 0 | BELUM TERCAPAI | Akan dilaksanakan Pekan Keselamatan Jalan pada minggu pertama bulan agustus                                                                                                                            | Seksi Sarana |
|    |                                                    | IKK7a<br>Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor                  | %   | 100 | Kalibrasi Alat Uji PKB                                         | Jumlah Kalibrasi Alat Uji PKB                      | Pemantauan dan Evaluasi Tupoksi Ditjen Hubdat | 100% | 100% | 79,110,000     | 100% | 0     | 0 | 0    | 0 | BELUM TERCAPAI | Melakukan pengawasan uji berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP pada seluruh kab/kota di Maluku Utara                                                                                                | Seksi Sarana |
|    |                                                    | IKK7b<br>Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP                  | Lok | 4   | Pemeliharaan Rambu Sungai                                      | Jumlah Pemeliharaan Rambu Sungai                   | Rambu Sungai dan Danau                        | 4    | 100% | 0              | 0    | 4     | 0 | 100% | 0 | TERCAPAI       | 1. Menginventaris kebutuhan fasilitas keselamatan di SDP<br>2. Melakukan monitoring terhadap fasilitas SDP yang telah terpasang                                                                        | Seksi Lalin  |

|    |                                                                                 |                                                                       |       |    |                                                  |                                                               |                                     |    |      |                |      |    |               |      |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|------|----------------|------|----|---------------|------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 4. | SK5<br>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat | IKK5.1<br>Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat | Nilai | 90 | Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat        | Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tupoksi Ditjen Hubdat | Penunjang Teknis Transportasi Darat | 90 | 100% | 5,683,025,000  | 100% | 90 | 0             | 100% | 0%  | TERCAPAI | 1. Melakukan Bimtek Balai Pengelola Transportasi Darat<br><br>2. Melakukan Penyusunan bahan dan RKA<br><br>3. Melakukan Penyusunan SAKIP, LKIP dan Profil BPTD<br><br>4. Melakukan Rakornis dan Konsolidasi BPTD<br><br>5. Melakukan Monitoring dan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat;<br><br>6. Melakukan Monitoring dan Pengawasan Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat;<br><br>7. Melakukan Monitoring dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan ANGLEB dan NATARU<br><br>8. Melakukan Kalibrasi alat uji;<br><br>9. Melakukan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun;<br><br>10. Melakukan Sosialisasi Andalalin di Provinsi Kalimantan Selatan;<br><br>11. Melakukan Pengawasan Gakum. | - Seksi Lalin<br>- Seksi Sarana<br>- Seksi Prasarana<br>- Subbag Tata Usaha |
| 5. | SK1<br>Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel                | IKK 1<br>Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat | Nilai | 85 | Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum | Jumlah Layanan Perkantoran                                    | Layanan Dukungan Manajemen Internal | 85 | 100% | 30,381,051,000 | 100% | 85 | 6,135,821,611 | 100% | 20% | TERCAPAI | Melaksanakan layanan perkantoran secara maksimal, Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai sesuai dengan aturan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Subbag Tata Usaha                                                           |

| MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025                       |                                                                                          |                                                                                |        |        |                                                                        |                                                             |                                               |                |      |                 |      |                   |                    |                   |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------|-----------------|------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI TRANSPORTASI DARAT KELAS II MALUKU UTARA |                                                                                          |                                                                                |        |        |                                                                        |                                                             |                                               |                |      |                 |      |                   |                    |                   |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |
| DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT                                            |                                                                                          |                                                                                |        |        |                                                                        |                                                             |                                               |                |      |                 |      |                   |                    |                   |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |
| KEMENTERIAN PERHUBUNGAN                                                          |                                                                                          |                                                                                |        |        |                                                                        |                                                             |                                               |                |      |                 |      |                   |                    |                   |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |
| BULAN FEBRUARI TAHUN 2025                                                        |                                                                                          |                                                                                |        |        |                                                                        |                                                             |                                               |                |      |                 |      |                   |                    |                   |                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |
| No                                                                               | Sasaran Kegiatan                                                                         | Indikator Kinerja Kegiatan                                                     | Satuan | Target | Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja Output                                    | Target Kinerja Output                         | Target Bulan-2 |      |                 |      | Realisasi Bulan-2 |                    | % Capaian Bulan-2 |                  | Evaluasi       | Rencana Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Penanggung Jawab                |
|                                                                                  |                                                                                          |                                                                                |        |        |                                                                        |                                                             |                                               | Target Output  |      | Target Anggaran |      | Realisasi Output  | Realisasi Anggaran | Capaian Output    | Capaian Anggaran |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |
|                                                                                  |                                                                                          |                                                                                |        |        |                                                                        |                                                             |                                               | Vol            | %    | Vol             | %    | Volume            | Volume             | %                 | %                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |
| 1                                                                                | 2                                                                                        | 3                                                                              | 4      | 5      | 6                                                                      | 7                                                           | 8                                             | 9              | 10   | 11              | 12   | 13                | 14                 | 15                | 16               | 17             | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19                              |
| 1.                                                                               | SK.1 Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi | IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan                      | %      | 100    | Subsidi Operasional Angkutan Perintis Provinsi Maluku Utara            | Jumlah Lintas Angkutan perintis yang dilayani               | Layanan Angkutan Jalan Perintis               | 6624           | 92   | 8,590,557,000   | 100% | 657               | 894,464,980        | 9.92%             | 10%              | BELUM TERCAPAI | Akan Melaksanakan Monitoring Evaluasi Operasional pelayanan angkutan jalan di trayek - trayek yang telah ditetapkan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.                                                                                                                                                                                             | - Seksi Lalin<br>- Seksi Sarana |
|                                                                                  |                                                                                          | IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan    | %      | 100    | Penyelenggaraan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Prioritas Nasional | Jumlah Lintas Angkutan penyeberangan perintis yang dilayani | Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis       | 2278           | 100% | 31,440,116,000  | 100% | 617               |                    | 27%               |                  | BELUM TERCAPAI | Akan melakukan pengawasan angkutan perintis penyeberangan agar melayani lintasan sesuai dengan kontrak dan target dengan benar.                                                                                                                                                                                                                                 | - Seksi Lalin<br>- Seksi Sarana |
|                                                                                  |                                                                                          | IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi                                    | Lokasi | 20     | Operasional Pelabuhan SDP                                              | Jumlah Pelabuhan SDP dikelola                               | Pengawasan operasional Pelabuhan SDP          | 20             | 100% | 3,037,018,000   | 100% | 20                | 0                  | 100%              | 0%               | TERCAPAI       | Melaksanakan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf pelabuhan penyeberangan;                                                                                                                                                                                                              | Seksi Prasarana                 |
| 2.                                                                               | SK2 Meningkatnya pelayanan transportasi darat                                            | IKK2.3 Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP | %      | 100    | Monitoring dan Pengawasan Pemenuhan SPM Pelabuhan Penyeberangan        | Jumlah pengawasan pemenuhan SPM Pelabuhan Penyeberangan     | Pemantauan dan Evaluasi Tupoksi Ditjen Hubdat | 100%           | 100% | 76,800,000      | 100% | 0%                | 0                  | 0%                | 0%               | BELUM TERCAPAI | 1.Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan;                                                                                                                                                                                                                           | Seksi Prasarana                 |
|                                                                                  |                                                                                          |                                                                                |        |        |                                                                        |                                                             |                                               |                |      |                 |      |                   |                    |                   |                  |                | 2. Melakukan pengawasan secara periodik terhadap ketepatan jadwal di lapangan;<br><br>3. Melakukan rapat evaluasi efektifitas pengaturan jadwal;<br><br>4. Memberlakukan sanksi yang tegas dan pemberian efek jera atas ketidakpatuhan perusahaan angkutan penyeberangan dlm mematuhi jam pelayanan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |                                 |

|    |                                                    |                                                                                        |     |     |                                                                |                                                    |                                               |      |      |                |      |       |   |      |   |                |                                                                                                                                                                                                        |              |
|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|----------------|------|-------|---|------|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3. | SK4<br>Meningkatnya keselamatan transportasi darat | IKK3.1<br>Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal    | %   | 100 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional | Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan | Perlengkapan Fasilitas Keselamatan Jalan      | 100% | 100% | 41,349,665,000 | 100% | 0.00% | 0 | 0%   | 0 | BELUM TERCAPAI | 1. Menginventaris kebutuhan infrastruktur keselamatan jalan<br>2. Membangun dan memfasilitasi infrastruktur keselamatan jalan<br>3. Melakukan monitoring terhadap fasilitas jalan yang telah terpasang | Seksi Lalin  |
|    |                                                    | IKK3.5<br>Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan | Org | 100 | Pekan Keselamatan Jalan                                        | Jumlah Kegiatan Pekan Keselamatan Jalan            | Pelayanan Keselamatan Transportasi Jalan      | 100  | 100% | 300,000,000    | 100% | 0     | 0 | 0    | 0 | BELUM TERCAPAI | Akan dilaksanakan Pekan Keselamatan Jalan pada minggu pertama bulan agustus                                                                                                                            | Seksi Sarana |
|    |                                                    | IKK7a<br>Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor                  | %   | 100 | Kalibrasi Alat Uji PKB                                         | Jumlah Kalibrasi Alat Uji PKB                      | Pemantauan dan Evaluasi Tupoksi Ditjen Hubdat | 100% | 100% | 79,110,000     | 100% | 0     | 0 | 0    | 0 | BELUM TERCAPAI | Melakukan pengawasan uji berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP pada seluruh kab/kota di Maluku Utara                                                                                                | Seksi Sarana |
|    |                                                    | IKK7b<br>Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP                  | Lok | 4   | Pemeliharaan Rambu Sungai                                      | Jumlah Pemeliharaan Rambu Sungai                   | Rambu Sungai dan Danau                        | 4    | 100% | 0              | 0    | 4     | 0 | 100% | 0 | TERCAPAI       | 1. Menginventaris kebutuhan fasilitas keselamatan di SDP<br>2. Melakukan monitoring terhadap fasilitas SDP yang telah terpasang                                                                        | Seksi Lalin  |

|    |                                                                                 |                                                                       |       |    |                                                  |                                                               |                                     |    |      |                |      |    |             |      |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|------|----------------|------|----|-------------|------|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 4. | SK5<br>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat | IKK5.1<br>Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat | Nilai | 90 | Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat        | Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tupoksi Ditjen Hubdat | Penunjang Teknis Transportasi Darat | 90 | 100% | 5,683,025,000  | 100% | 90 | 813,612,192 | 100% | 14% | TERCAPAI | 1. Melakukan Bimtek Balai Pengelola Transportasi Darat<br><br>2. Melakukan Penyusunan bahan dan RKA<br><br>3. Melakukan Penyusunan SAKIP, LKIP dan Profil BPTD<br><br>4. Melakukan Rakornis dan Konsolidasi BPTD<br><br>5. Melakukan Monitoring dan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat;<br><br>6. Melakukan Monitoring dan Pengawasan Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat;<br><br>7. Melakukan Monitoring dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan ANGLEB dan NATARU<br><br>8. Melakukan Kalibrasi alat uji;<br><br>9. Melakukan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun;<br><br>10. Melakukan Sosialisasi Andalalin di Provinsi Kalimantan Selatan;<br><br>11. Melakukan Pengawasan Gakum. | - Seksi Lalin<br>- Seksi Sarana<br>- Seksi Prasarana<br>- Subbag Tata Usaha |
| 5. | SK1<br>Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel                | IKK 1<br>Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat | Nilai | 85 | Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum | Jumlah Layanan Perkantoran                                    | Layanan Dukungan Manajemen Internal | 85 | 100% | 30,381,051,000 | 100% | 85 | 724,580,000 | 100% | 2%  | TERCAPAI | Melaksanakan layanan perkantoran secara maksimal, Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai sesuai dengan aturan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Subbag Tata Usaha                                                           |

MONITORING RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI TRANSPORTASI DARAT KELAS II MALUKU UTARA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BULAN JANUARI TAHUN 2025

| No | Sasaran Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja Kegiatan                                                        | Satuan | Target | Kegiatan                                                               | Indikator Kinerja Output                                    | Target Kinerja Output                         | Target Bulan-1 |      |                 |      | Realisasi Bulan-1 |                    | % Capaian Bulan-1 |                  | Evaluasi       | Rencana Tindak Lanjut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Penanggung Jawab                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------|-----------------|------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    |                                                                                             |                                                                                   |        |        |                                                                        |                                                             |                                               | Target Output  |      | Target Anggaran |      | Realisasi Output  | Realisasi Anggaran | Capaian Output    | Capaian Anggaran |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
|    |                                                                                             |                                                                                   |        |        |                                                                        |                                                             |                                               | Vol            | %    | Vol             | %    | Volume            | Volume             | %                 | %                |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
| 1  | 2                                                                                           | 3                                                                                 | 4      | 5      | 6                                                                      | 7                                                           | 8                                             | 9              | 10   | 11              | 12   | 13                | 14                 | 15                | 16               | 17             | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19                              |
| 1. | SK.1<br>Meningkatnya konektivitas transportasi darat dan keterpaduan antarmoda transportasi | IKK1.1 Persentase pelaksanaan keperintisan angkutan jalan                         | %      | 100    | Subsidi Operasional Angkutan Perintis Provinsi Maluku Utara            | Jumlah Lintas Angkutan perintis yang dilayani               | Layanan Angkutan Jalan Perintis               | 6624           | 92   | 8,590,557,000   | 100% | 343               | 437,640,980        | 5.18%             | 5%               | BELUM TERCAPAI | Akan Melaksanakan Monitoring Evaluasi Operasional pelayanan angkutan jalan di trayek - trayek yang telah ditetapkan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.                                                                                                                                                                                     | - Seksi Lalin<br>- Seksi Sarana |
|    |                                                                                             | IKK1.5 Persentase pelaksanaan pelayanan keperintisan angkutan penyeberangan       | %      | 100    | Penyelenggaraan Keperintisan Angkutan Penyeberangan Prioritas Nasional | Jumlah Lintas Angkutan penyeberangan perintis yang dilayani | Layanan Angkutan Penyeberangan Perintis       | 2278           | 100% | 31,440,116,000  | 100% | 306               |                    | 13%               |                  | BELUM TERCAPAI | Akan melakukan pengawasan angkutan perintis penyeberangan agar melayani lintasan sesuai dengan kontrak dan target dengan benar.                                                                                                                                                                                                                         | - Seksi Lalin<br>- Seksi Sarana |
|    |                                                                                             | IKK1.6 Jumlah pelabuhan SDP yang beroperasi                                       | Lokasi | 20     | Operasional Pelabuhan SDP                                              | Jumlah Pelabuhan SDP dikelola                               | Pengawasan operasional Pelabuhan SDP          | 20             | 100% | 3,037,018,000   | 100% | 20                | 0                  | 100%              | 0%               | TERCAPAI       | Melaksanakan pengawasan harian dan berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP terkait tugas dan tanggung jawab seluruh staf pelabuhan penyeberangan;                                                                                                                                                                                                      | Seksi Prasarana                 |
| 2. | SK2<br>Meningkatnya pelayanan transportasi darat                                            | IKK2.3<br>Persentase pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di pelabuhan SDP | %      | 100    | Monitoring dan Pengawasan Pemenuhan SPM Pelabuhan Penyeberangan        | Jumlah pengawasan pemenuhan SPM Pelabuhan Penyeberangan     | Pemantauan dan Evaluasi Tupoksi Ditjen Hubdat | 100%           | 100% | 76,800,000      | 100% | 0%                | 0                  | 0%                | 0%               | BELUM TERCAPAI | 1.Berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar lebih meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan dan ketepatan jadwal di lapangan;                                                                                                                                                                                                                   | Seksi Prasarana                 |
|    |                                                                                             |                                                                                   |        |        |                                                                        |                                                             |                                               |                |      |                 |      |                   |                    |                   |                  |                | 2. Melakukan pengawasan secara periodik terhadap ketepatan jadwal di lapangan;<br>3. Melakukan rapat evaluasi efektifitas pengaturan jadwal;<br>4. Memberlakukan sanksi yang tegas dan pemberian efek jera atas ketidakpatuhan perusahaan angkutan penyeberangan dim mematuhi jam pelayanan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |                                 |

|    |                                                    |                                                                                        |     |     |                                                                |                                                    |                                               |      |      |                |      |       |   |      |   |                |                                                                                                                                                                                                        |              |
|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|----------------|------|-------|---|------|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3. | SK4<br>Meningkatnya keselamatan transportasi darat | IKK3.1<br>Persentase perlengkapan jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal    | %   | 100 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan Prioritas Nasional | Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan | Perlengkapan Fasilitas Keselamatan Jalan      | 100% | 100% | 41,349,665,000 | 100% | 0.00% | 0 | 0%   | 0 | BELUM TERCAPAI | 1. Menginventaris kebutuhan infrastruktur keselamatan jalan<br>2. Membangun dan memfasilitasi infrastruktur keselamatan jalan<br>3. Melakukan monitoring terhadap fasilitas jalan yang telah terpasang | Seksi Lalin  |
|    |                                                    | IKK3.5<br>Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan | Org | 100 | Pekan Keselamatan Jalan                                        | Jumlah Kegiatan Pekan Keselamatan Jalan            | Pelayanan Keselamatan Transportasi Jalan      | 100  | 100% | 300,000,000    | 100% | 0     | 0 | 0    | 0 | BELUM TERCAPAI | Akan dilaksanakan Pekan Keselamatan Jalan pada minggu pertama bulan agustus                                                                                                                            | Seksi Sarana |
|    |                                                    | IKK7a<br>Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor                  | %   | 100 | Kalibrasi Alat Uji PKB                                         | Jumlah Kalibrasi Alat Uji PKB                      | Pemantauan dan Evaluasi Tupoksi Ditjen Hubdat | 100% | 100% | 79,110,000     | 100% | 0     | 0 | 0    | 0 | BELUM TERCAPAI | Melakukan pengawasan uji berkala untuk memastikan pelaksanaan SOP pada seluruh kab/kota di Maluku Utara                                                                                                | Seksi Sarana |
|    |                                                    | IKK7b<br>Jumlah ketersediaan fasilitas keselamatan alur pelayaran SDP                  | Lok | 4   | Pemeliharaan Rambu Sungai                                      | Jumlah Pemeliharaan Rambu Sungai                   | Rambu Sungai dan Danau                        | 4    | 100% | 0              | 0    | 4     | 0 | 100% | 0 | TERCAPAI       | 1. Menginventaris kebutuhan fasilitas keselamatan di SDP<br>2. Melakukan monitoring terhadap fasilitas SDP yang telah terpasang                                                                        | Seksi Lalin  |



|    |                                                                                 |                                                                       |       |    |                                                  |                                                               |                                     |    |      |                |      |    |             |      |     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|----|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|------|----------------|------|----|-------------|------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 4. | SK5<br>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat | IKK5.1<br>Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat | Nilai | 90 | Kegiatan Tupoksi Ditjen Perhubungan Darat        | Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Tupoksi Ditjen Hubdat | Penunjang Teknis Transportasi Darat | 90 | 100% | 5,683,025,000  | 100% | 90 | 813,612,192 | 100% | 14% | TERCAPAI | 1. Melakukan Bimtek Balai Pengelola Transportasi Darat<br><br>2. Melakukan Penyusunan bahan dan RKA<br><br>3. Melakukan Penyusunan SAKIP, LKIP dan Profil BPTD<br><br>4. Melakukan Rakornis dan Konsolidasi BPTD<br><br>5. Melakukan Monitoring dan Pengawasan Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Perhubungan Darat;<br><br>6. Melakukan Monitoring dan Pengawasan Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat;<br><br>7. Melakukan Monitoring dan PengawasanTeknis Penyelenggaraan ANGLEB dan NATARU<br><br>8. Melakukan Kalibrasi alat uji;<br><br>9. Melakukan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun;<br><br>10. Melakukan Sosialisasi Andalalin di Provinsi Kalimantan Selatan;<br><br>11. Melakukan Pengawasan Gakum. | - Seksi Lalin<br>- Seksi Sarana<br>- Seksi Prasarana<br>- Subbag Tata Usaha |
| 5. | SK1<br>Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel                | IKK 1<br>Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Ditjen Perhubungan Darat | Nilai | 85 | Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN, dan Umum | Jumlah Layanan Perkantoran                                    | Layanan Dukungan Manajemen Internal | 85 | 100% | 30,381,051,000 | 100% | 85 | 724,580,000 | 100% | 2%  | TERCAPAI | Melaksanakan layanan perkantoran secara maksimal, Pembayaran Gaji dan Tunjangan pegawai sesuai dengan aturan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Subbag Tata Usaha                                                           |